



Gender dan Pembangunan Ekonomi

Studi Lintas Provinsi di Indonesia

Lestari Agusalim,
Sulistiyowati, Shifa Nur Amalia

GENDER DAN PEMBANGUNAN EKONOMI:

Studi Lintas Provinsi di Indonesia

Lestari Agusalim

Sulistiyowati

Shifa Nur Amalia

GENDER DAN PEMBANGUNAN EKONOMI:

Studi Lintas Provinsi di Indonesia

Edisi Pertama
Copyright @ 2023

ISBN 978-623-130-634-0
E-ISBN 978-623-130-692-0

15,5 x 23 cm
156 h.
cetakan ke-1, 2023

Penulis

Lestari Agusalim
Sulistiyowati
Shifa Nur Amalia

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya buku berjudul "***Gender dan Pembangunan Ekonomi: Studi Lintas Provinsi Di Indonesia***" ini bisa diselesaikan pada waktunya. Buku ini bukan hanya merupakan kumpulan kata-kata dan fakta, tetapi sebuah perjalanan pengetahuan yang akan membawa pembaca lebih dekat dengan realitas kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam konteks gender dan pembangunan ekonomi.

Apakah isu gender penting dalam pembangunan ekonomi? Pertanyaan ini menjadi inti dari eksplorasi dalam buku ini. Dalam era di mana kesetaraan gender semakin menjadi fokus utama pembangunan berkelanjutan, buku ini hadir untuk menyajikan studi mendalam yang mengeksplorasi bagaimana pembangunan dan pemberdayaan gender dapat menjadi pendorong utama kesetaraan gender yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Penekanan pada konteks Indonesia memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang unik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tetapi juga menjadi panduan yang menginspirasi tindakan konkret. Dengan memahami kompleksitas isu-isu gender dalam pembangunan ekonomi, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjelajahi buku ini, dan semoga

dapat menjadi kontribusi yang bermakna dalam perjalanan kita menuju kesetaraan gender yang sejati di Indonesia.

Bogor, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KONSEP GENDER.....	13
A. Ketimpangan Gender	14
1. Penyebab Ketimpangan Gender.....	15
2. Dampak Ketimpangan Gender.....	16
3. Pengukuran Ketimpangan Gender.....	17
4. Ketimpangan Gender di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Covid-19	23
B. Pembangunan Gender	30
C. Pemberdayaan Gender.....	41
BAB 3 PERTUMBUHAN EKONOMI	49
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	50
1. Teori Pertumbuhan Solow-Swan	50
2. Teori Pertumbuhan Endogen (<i>Endogenous Growth Theory</i>).....	50
B. Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	51
C. Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi.....	52
D. Hubungan Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi.....	53
E. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sebelum dan Sesudah Covid-19	68
BAB 4 KEMISKINAN.....	75
A. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	75

B.	Jenis-jenis Kemiskinan	78
1.	Kemiskinan Absolut	79
2.	Kemiskinan Struktural	79
3.	Kemiskinan Kultural	80
4.	Kemiskinan Relatif.....	80
C.	Dampak Kemiskinan	82
D.	Cara Mengatasi Kemiskinan.....	83
E.	Hubungan Gender dan Kemiskinan.....	84
F.	Kemiskinan di Indonesia.....	96
BAB 5	GENDER VS PERTUMBUHAN EKONOMI.....	101
A.	Model Empiris Efek Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	101
B.	Efek Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi	103
1.	Pengaruh Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	106
2.	Pengaruh Indeks Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	108
3.	Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	109
4.	Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	111
5.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	112
6.	Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	113
7.	Pengaruh Rasio Perbandingan Upah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	114
C.	Kebijakan Pembangunan Gender dalam Pengurangan Kemiskinan.....	115
BAB 6	GENDER VS KEMISKINAN	119
A.	Model Empiris Efek Gender terhadap Kemiskinan.....	119

B. Efek Gender terhadap Kemiskinan	120
1. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan.....	122
2. Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Kemiskinan.....	123
3. Pengaruh Rasio Perbandingan Upah terhadap Kemiskinan.....	124
4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.....	124
5. Pengaruh Pertumbuhan Investasi terhadap Kemiskinan.....	125
6. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan ...	126
C. Kebijakan Pembangunan Gender dalam Pengurangan Kemiskinan	126
BAB 7 PENUTUP	129
DAFTAR PUSTAKA.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kategori IKG Berdasarkan Rentang Nilai.....	23
Tabel 2.	Perkembangan IKG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	28
Tabel 3.	Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru	32
Tabel 4.	Dimensi IPG.....	32
Tabel 5.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010-2022 di Indonesia	37
Tabel 6.	Perkembangan IPG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	40
Tabel 7.	Dimensi IDG	41
Tabel 8.	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010-2022 di Indonesia.....	44
Tabel 9.	Perkembangan IDG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	47
Tabel 10.	Ringkasan Studi Gender dan Pertumbuhan Ekonomi	58
Tabel 11.	Perkembangan PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	73
Tabel 12.	Ringkasan Studi Gender dan Kemiskinan.....	88
Tabel 13.	Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2022 di Indonesia.....	98
Tabel 14.	Variabel Studi Efek Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	101
Tabel 15.	Hasil Analisis Efek Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	104

Tabel 16. Hasil Estimasi Periode Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.....	106
Tabel 17. Hasil Analisis Efek Gender terhadap Kemiskinan	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan <i>Gender Inequality Index</i> di Indonesia dan Dunia	3
Gambar 2.	<i>Gender Inequality Index</i> di Negara ASEAN, 2021	4
Gambar 3.	Indikasi Awal Hubungan IKG dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	7
Gambar 4.	Indikasi Awal Hubungan IKG dengan Kemiskinan Tahun 2022.....	9
Gambar 5.	Pengelompokkan Indikator dalam Penghitungan IKG	19
Gambar 6.	<i>Global Gender Gap Index</i> Negara-negara Asia Tenggara, 2021	26
Gambar 7.	Perkembangan GII UNDP dan IKG BPS.....	27
Gambar 8.	Metodologi Penghitungan IPG	31
Gambar 9.	Perkembangan IPG di Indonesia Tahun 2010-2022	35
Gambar 10.	Perkembangan IDG di Indonesia Tahun 2010-2022	43
Gambar 11.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	70
Gambar 12.	Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Menurut Ragnar Nurkse	76
Gambar 13.	Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Menurut Mydal	77
Gambar 14.	Tingkat kemiskinan Indonesia dan Dunia dengan Pendapatan Kurang dari \$2,15 per Hari (2017 PPP) (% dari populasi)	98



PENDAHULUAN

Isu gender dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) perlu diangkat dalam konteks Indonesia karena mencerminkan keterkaitan erat antara pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat (Astariyani *et al.*, 2022; Yuspin & Aulia, 2022;). Pemberdayaan perempuan menjadi landasan utama dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-5, yang secara khusus menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Virgianita *et al.*, 2021). Di Indonesia, peran perempuan dalam mewujudkan SDGs ke-5 tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi-dimensi penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fokus utama adalah memastikan akses yang setara terhadap pendidikan. Pendidikan yang setara dan berkualitas menjadi fondasi untuk pemberdayaan perempuan, memberi mereka alat untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, SDGs ke-5 menggarisbawahi pentingnya kesehatan perempuan, termasuk akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi. Pemberdayaan perempuan juga mencakup partisipasi politik, di mana peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik diakui dan ditingkatkan. Implementasi SDGs ke-5 di Indonesia tidak hanya mengarah pada pemberdayaan ekonomi perempuan, tetapi juga melibatkan aspek-aspek penting lainnya yang bersifat holistik, untuk memastikan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Sebagai negara yang berkomitmen pada pencapaian SDGs, Indonesia perlu memperhatikan dimensi gender agar bisa mencapai kesetaraan dan keberlanjutan yang sesungguhnya. Isu gender menjadi

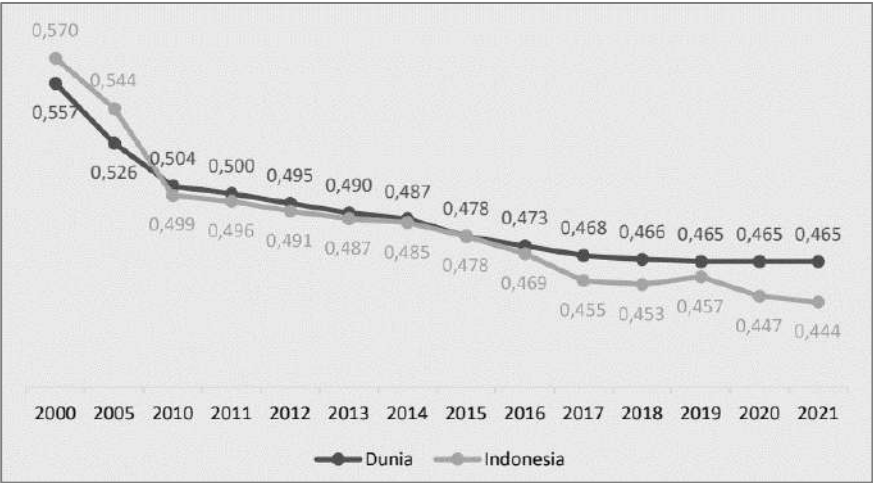
landasan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, yang semuanya merupakan tujuan SDGs (Aula, 2023). Di samping itu, mengangkat isu gender relevan di Indonesia mengingat keragaman budaya dan struktur sosial yang kompleks. Setiap daerah di Indonesia memiliki dinamika sosial yang unik, sehingga pemahaman dan penanganan terhadap isu-isu gender perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Menyelaraskan isu gender dengan SDGs adalah langkah penting untuk mengintegrasikan agenda pembangunan nasional dengan standar global.

Selain aspek internal, pengangkatan isu gender dalam konteks Indonesia juga sejalan dengan komitmen global terhadap keadilan gender. Dengan menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan dalam akses sumber daya, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidaksetaraan dalam lapangan kerja, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam merumuskan solusi yang dapat diadopsi oleh komunitas internasional.

Dengan mengangkat isu gender, Indonesia akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang setara dalam meraih potensinya. Hal ini tidak hanya membawa manfaat langsung pada tingkat nasional tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan global untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan setara bagi semua (Nurchaya & Akbarizan, 2023; Fakih 2001).

Gambar 1 memperlihatkan tren perbaikan yang signifikan dalam ketidaksetaraan gender baik di Indonesia maupun di dunia yang diukur dengan *Gender Inequality Index* (GII), ditandai dengan penyusutan nilai GII yang semakin kecil. Namun, ketimpangan ini masih sangat bervariasi jika dilihat dari perspektif regional. Pada tahun 2021, wilayah Eropa dan Asia Tengah telah mencapai tingkat GII yang relatif rendah, yaitu 0,227, menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender. Di sisi lain, negara-negara di kawasan Arab, Sub-Sahara Afrika, dan Asia Selatan masih memiliki nilai GII di atas 0,5, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di kawasan tersebut masih tinggi, mencapai hingga 50 persen. Secara keseluruhan, rata-rata nilai GII negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2021 adalah sebesar 0,337. Angka ini

mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang mencapai 0,324. Fenomena ini juga mencerminkan situasi yang terjadi di Indonesia. Selama periode 2000 hingga 2018, GII Indonesia mengalami penurunan yang menggembirakan. Meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 hingga 2021, nilai GII Indonesia kembali mengalami penurunan, menunjukkan upaya positif dalam mengurangi ketimpangan gender di negara ini (Nugroho dan Clarissa, 2022).

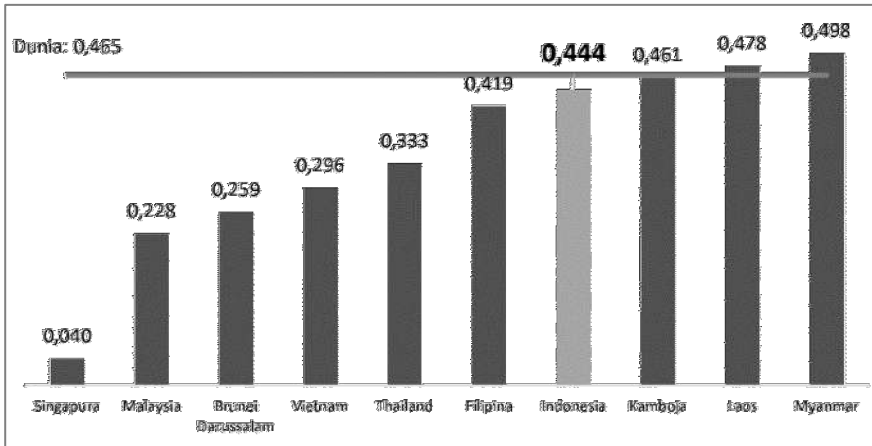


Gambar 1. Perkembangan *Gender Inequality Index* di Indonesia dan Dunia
 Sumber: <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN>

Pada tahun 2020, terdapat tren positif terkait GII di Indonesia, di mana angka GII negara ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai GII secara global. Pada tahun tersebut, GII Indonesia mencapai 0,447, lebih rendah dibanding GII dunia yang mencapai 0,465. Keberhasilan ini berlanjut hingga tahun 2021, di mana GII Indonesia mencapai 0,444, yang lebih rendah sebanyak 0,021 poin dibandingkan dengan GII dunia. Hal ini mencerminkan kondisi pembangunan gender yang semakin optimal di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Selain itu, pencapaian dalam pembangunan manusia di Indonesia juga mengalami perbaikan yang signifikan, dengan ketimpangan gender yang terkoreksi sebanyak 0,44 persen (lihat Gambar 2).

Pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 170 negara dalam hal ketimpangan gender. Pencapaian ini menunjukkan

keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pemberdayaan, dan akses pasar tenaga kerja. Peringkat ini mengalami peningkatan sebanyak 11 peringkat sejak tahun 2019, mencerminkan komitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan gender di Indonesia (Nugroho dan Clarissa, 2022).



Gambar 2. *Gender Inequality Index* di Negara ASEAN, 2021

Sumber: HDR 2021/2022

Kesetaraan gender telah menjadi target utama dalam upaya pembangunan di banyak negara, terutama di mana ketimpangan pembangunan yang signifikan masih menjadi isu krusial. Ketidaksetaraan dalam pembangunan berdasarkan gender sering kali menghambat kemampuan suatu masyarakat untuk mencapai potensi penuh dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Idealnya, dalam upaya pembangunan manusia, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki akses yang setara untuk turut serta dalam proses pembangunan, memiliki kontrol terhadap sumber daya yang tersedia, dan merasakan manfaat dari hasil pembangunan secara adil dan setara. Kesetaraan gender menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Abdoellah, 2016).

Persoalan gender dan ekonomi di Indonesia menjadi sorotan penting dalam konteks ketidaksetaraan dan tantangan dalam

mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil (Ngoyo, 2015). Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan gender tetap menjadi hambatan dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh warga.

Permasalahan utama terletak pada disparitas antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor ekonomi. Meskipun banyak perempuan terlibat dalam sektor informal, mereka sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan kontribusi mereka. Upah yang rendah, kurangnya akses terhadap peluang karier, dan kesenjangan dalam kepemimpinan menjadi beberapa persoalan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Selain itu, peran tradisional yang diatribusikan kepada perempuan sebagai pengurus rumah tangga sering kali membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi formal (Nofianti, 2016). Kendala ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang bisnis, pendidikan, dan pelatihan, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam mengembangkan kapasitas ekonomi perempuan. Permasalahan gender dan ekonomi di Indonesia juga mencakup isu ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset dan akses terhadap layanan keuangan. Perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke kredit dan layanan perbankan, sehingga menghambat potensi mereka untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil.

Mengatasi persoalan gender dan ekonomi memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan, memberdayakan perempuan secara ekonomi, dan menghilangkan stereotip gender yang membatasi potensi mereka. Hanya dengan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam konteks ekonomi, Indonesia dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warganya.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan keragaman budaya, menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu gender yang krusial. Pada era Pencapaian SDGs, keberlanjutan dan

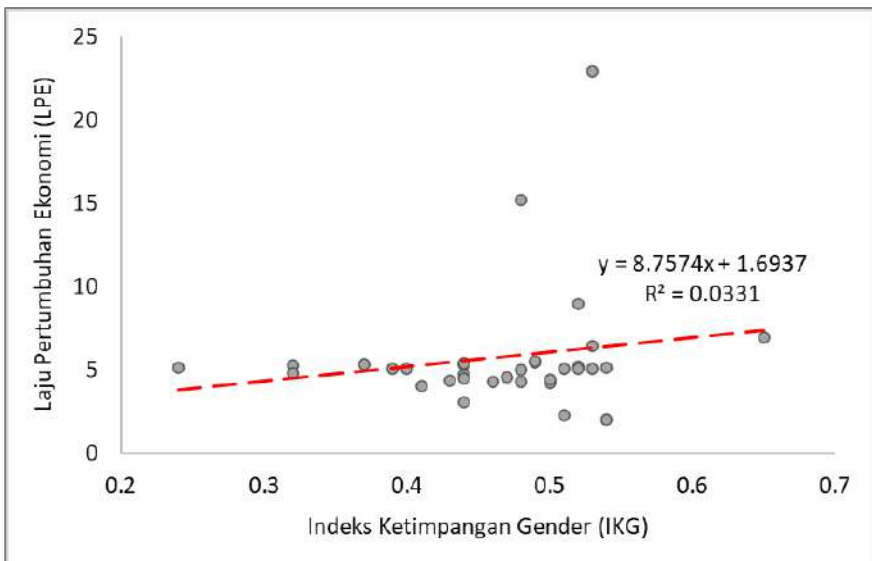
pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dan mengentaskan kemiskinan. Inilah mengapa isu-isu gender di Indonesia menjadi elemen penting dalam merangkul SDGs dan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Isu gender di Indonesia mencerminkan ketidaksetaraan yang masih bersifat merata, terutama terlihat dalam akses pendidikan, peluang pekerjaan, dan dalam pengambilan keputusan penting dalam masyarakat (KemenPPPA, 2022). Meskipun progres telah dicapai, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Stereotip gender dan peran tradisional yang diatribusikan kepada perempuan sering kali menjadi kendala signifikan, menghambat pengembangan penuh potensi mereka. Penggambaran perempuan sebagai makhluk yang lebih cocok untuk peran rumah tangga daripada untuk karier profesional dapat mengakibatkan keterbatasan peluang pekerjaan yang relevan dengan kualifikasi mereka. Selain itu, dalam pengambilan keputusan penting di masyarakat, peran tradisional yang cenderung membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan ketidaksetaraan yang berkelanjutan.

Melibatkan perempuan secara penuh dalam kegiatan ekonomi bukan hanya merupakan langkah menuju kesetaraan gender, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Nursini & Syahrul, 2022). Berbagai penelitian menegaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi suatu negara. Ketika perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, potensi manusia yang lebih besar dapat dimanfaatkan secara efisien. Peran perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, baik formal maupun informal, dapat memberikan sumbangan berharga terhadap peningkatan *output* ekonomi secara keseluruhan. Dengan melibatkan perempuan dalam proses produksi dan mengakui kontribusi mereka secara adil, sebuah negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Gambar 3 memperlihatkan suatu indikasi dimana terdapat asosiasi positif antara ketimpangan gender dengan laju pertumbuhan

ekonomi (LPE). Azwar dan Subekan (2016) berpendapat bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang memiliki golongan ekonomi lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Minasyan *et al.* (2019) ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan gender cukup besar terjadi di negara berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak terlepas dari isu ketidaksetaraan gender. Adika dan Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan gender merupakan bentuk diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Budaya masyarakat menginterpretasikan perbedaan biologis ini untuk menciptakan persyaratan sosial bagi kesesuaian perilaku yang pada akhirnya memengaruhi hak, sumber daya, dan kekuasaan. Padahal, kesetaraan dan berkurangnya ketimpangan merupakan indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Gambar 3. Indikasi Awal Hubungan IKG dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

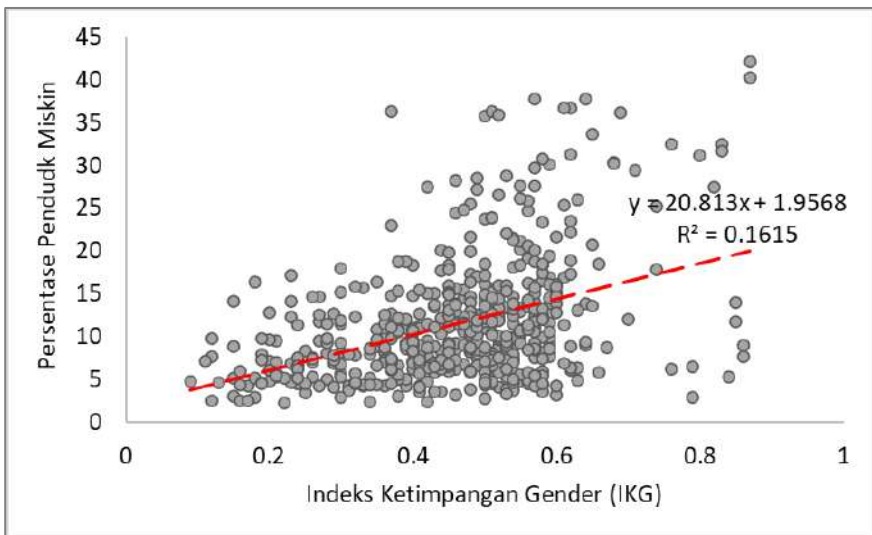
Catatan: Observasi seluruh provinsi di Indonesia

Pengentasan kemiskinan menjadi sebuah tugas yang kompleks, dan kesetaraan gender muncul sebagai elemen kunci dalam meraih tujuan tersebut. Mengatasi kemiskinan melalui pendekatan kesetaraan gender bukan hanya sekadar agenda sosial, melainkan suatu kebijakan strategis yang dapat menciptakan dampak positif yang luas (Dewi *et al.*, 2020). Pemberdayaan perempuan menjadi pusat dari upaya ini, dengan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, masyarakat menciptakan dasar yang lebih kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Melibatkan perempuan secara penuh dalam kegiatan ekonomi, memberikan mereka hak yang setara dalam kepemilikan aset, dan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga dan masyarakat, semuanya merupakan langkah-langkah krusial menuju kesetaraan gender yang dapat secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan.

Ketidaksetaraan gender tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga memberikan dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan gender berfungsi sebagai penghambat yang mencegah mencapainya potensi ekonomi maksimal. Sebagai contoh, ketika sebagian besar potensi manusia, khususnya perempuan, tidak dimanfaatkan sepenuhnya, negara kehilangan kontribusi berharga yang dapat diberikan oleh setengah penduduknya. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan peluang pekerjaan mengakibatkan hilangnya bakat dan keterampilan yang dapat memperkaya ekonomi.

Dampak ekonomi negatif juga terlihat dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dapat membuka pintu untuk integrasi perempuan dalam sektor ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengurangi ketidaksetaraan gender memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga menjadi

penghambat dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak dan sumber daya ekonomi lainnya dapat menyulitkan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Gambar 4 memperkuat narasi tersebut dimana terdapat indikasi bahwa ketimpangan gender memperburuk persoalan kemiskinan di Indonesia baik di level provinsi, kabupaten, maupun kota.



Gambar 4. Indikasi Awal Hubungan IKG dengan Kemiskinan Tahun 2022

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Catatan: Observasi provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia

Terdapat petanda-petanda bahwa ketimpangan gender seakan-akan menghasilkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, namun ironisnya, hal ini juga diiringi dengan peningkatan kemiskinan. Dilema ini merupakan ancaman yang serius, dan oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memisahkan keterkaitan ini, yang sering disebut sebagai "*decoupling*". *Decoupling* mengacu pada usaha untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan gender, sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi segelintir orang sementara meninggalkan yang lain dalam kemiskinan, tetapi dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah progresif dalam mendukung kesetaraan gender, akan tetapi tantangan-tantangan yang perlu diatasi tetap ada, dan salah satunya adalah budaya patriarki yang dapat menjadi penghambat terhadap perubahan signifikan. Budaya patriarki menciptakan norma-norma sosial yang memberikan kelebihan dan kontrol yang lebih besar kepada laki-laki dalam struktur masyarakat. Tantangan utama yang muncul dari budaya ini adalah adanya ketidaksetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab di antara jenis kelamin (KemenPPPA, 2022; Anto *et al.*, 2023).

Budaya patriarki sering kali mengakar dalam sistem nilai dan norma-norma sosial yang telah ada selama bertahun-tahun. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkup keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Peran-peran tradisional yang diatribusikan kepada perempuan dan laki-laki dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya (Aula, 2023).

Langkah-langkah menuju kesetaraan gender memerlukan bukan hanya perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan dalam kesadaran budaya (Larasati *et al.*, 2023). Pendidikan dan advokasi menjadi kunci dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap peran gender. Selain itu, menciptakan ruang yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat nasional, adalah langkah penting untuk mengatasi budaya patriarki. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci menuju kesetaraan gender di Indonesia. Dengan bekerja bersama-sama, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung perubahan budaya menuju kesetaraan gender, menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan setara bagi semua.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya, studi ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memahami perkembangan gender dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi baik pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian mendalam tentang isu-isu gender dan dampaknya terhadap pembangunan adalah suatu keharusan dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan

beragam. Buku ini muncul sebagai sarana untuk menggali lebih dalam sejauh mana gender memengaruhi dinamika ekonomi Indonesia dan bagaimana pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif. Dengan menjembatani pemahaman mengenai gender dan pembangunan ekonomi, buku ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan relevan bagi para pembaca yang ingin memahami dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan gender dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.



2

KONSEP GENDER

Gender adalah konsep sosial dan budaya yang mengacu pada peran, tanggung jawab, dan norma-norma yang diidentifikasi sebagai maskulin atau feminin dalam suatu masyarakat. Ini berbeda dari konsep biologis seks, yang merujuk pada perbedaan fisik dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan. Gender mencakup berbagai atribut yang tidak hanya terbatas pada karakteristik fisik, melainkan juga mencakup aspek-aspek seperti perilaku, identitas, dan peran sosial. Konsep gender memahami bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak bersifat bawaan, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang memengaruhi cara individu memahami diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gender juga dapat dilihat sebagai suatu spektrum, mengakui keragaman dan kompleksitas identitas gender di luar bingkai biner tradisional laki-laki dan perempuan.

Definisi gender mencakup dua dimensi utama: pertama, gender sebagai kategori sosial yang diterapkan pada individu dan kelompok dalam masyarakat; kedua, gender sebagai identitas pribadi yang dipahami dan diinternalisasi oleh individu. Secara sosial, gender memberikan kerangka interpretatif yang mengarahkan norma-norma, harapan, dan peran-peran yang diatribusikan kepada individu berdasarkan identifikasi mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas gender, di sisi lain, merupakan pengalaman internal individu terhadap diri mereka sendiri sebagai laki-laki, perempuan, atau bentuk identitas gender lainnya (Suryanti dan Sholikhah, 2021; Wiasti, 2017). Keseluruhan, konsep dan definisi gender menciptakan kerangka kerja yang kaya dan multidimensional untuk menganalisis serta memahami peran dan pengaruh gender dalam masyarakat.

A. Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender (*gender inequalities*) adalah suatu kondisi di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem gender, ketimpangan gender dapat terwujud apabila ada perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Keterbelakangan perempuan merupakan bukti bahwa masih ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sejatinya, perbedaan gender dalam hal kedudukan dan peran tidak menjadi masalah selama tidak ada ketimpangan. Namun pada kenyataannya, beberapa ketimpangan tersebut lahir karena adanya perbedaan gender. Ketidaksetaraan gender biasanya merupakan dampak dari sebuah kebijakan yang didasari oleh adat istiadat, norma, atau struktur masyarakat (Afif *et al.*, 2020). Menurut Ratnawati *et al.*, (2019) ketidaksetaraan gender dapat bersifat: (1) Langsung, yaitu pembedaan perlakuan secara terbuka dan terus menerus, baik karena perilaku, norma, maupun aturan yang berlaku, (2) Tidak langsung, yaitu aturan yang sama, tetapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu, (3) Sistemik, yaitu ketidaksetaraan yang berakar dari sejarah, norma, atau struktur dalam sejarah, norma, atau struktur masyarakat yang mewariskan kondisi yang diskriminatif.

Kesetaraan gender merupakan hak bagi setiap orang dari berbagai kalangan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dan memiliki potensi yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol terhadap pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Tercapainya kesetaraan gender di segala bidang juga dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi,

dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan (Tampubulon *et al.*, 2022).

1. Penyebab Ketimpangan Gender

Perbedaan gender adalah penyebab munculnya ketimpangan gender. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan gender masih terjadi, terutama di negara-negara berkembang. Ketidaksetaraan ini terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, baik pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender, sebagai berikut:

- a. Faktor budaya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mewarisi budaya patriarki dari para penjajah, di mana masyarakatnya percaya bahwa laki-laki memiliki kuasa atas segala sesuatu. Budaya ini masih melekat di sebagian masyarakat Indonesia, sehingga tidak jarang perempuan diperlakukan tidak adil dalam berbagai hal (Zuhri dan Amalia, 2022).
- b. Dalam bidang ekonomi, kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi di suatu daerah disebabkan oleh konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga laki-laki lebih diprioritaskan dalam bidang ekonomi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan harus bertanggung jawab terhadap keluarga (Khaerani, 2017).
- c. Dalam dunia politik, ada pandangan bahwa perempuan tidak cocok untuk terlibat dalam politik karena perempuan lebih cocok dengan peran domestik, perempuan kurang memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko. Akibatnya, baik perempuan maupun laki-laki secara umum sudah memiliki perbedaan, dunia publik bagi laki-laki dan dunia domestik bagi perempuan (Hidayah dan Munandar, 2016).
- d. Dalam bidang pekerjaan yang belum dipersiapkan untuk menerima perempuan sebagai pemimpin, maskulinitas laki-laki dianggap lebih positif dalam memimpin

dibandingkan dengan feminitas perempuan. Anggapan ini menjadi belenggu bagi eksistensi perempuan sebagai pemimpin sebuah instansi sehingga akan menghambat proses terwujudnya kondisi dunia yang lebih setara (Aprilia *et al.*, 2020).

- e. Di bidang pendidikan, diskriminasi ini terjadi ketika orang tua tidak memberikan pendidikan yang setara antara anak perempuan dan laki-laki, dengan tidak memberikan harapan kepada anak perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, karena orang tua beranggapan bahwa anak perempuan kelak akan hidup dengan orang lain dan tidak lagi menjadi milik orang tuanya (Rahmawati, 2016).

2. Dampak Ketimpangan Gender

Dampak dari ketimpangan gender dapat mencakup berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas, adapun dampak ketimpangan gender menurut Udzma *et al.*, (2023), diantaranya adalah:

- a. Marginalisasi adalah proses peminggiran karena perbedaan gender yang berakibat pada pengucilan atau pemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk meminggirkan seseorang atau kelompok. Salah satunya dengan menggunakan asumsi gender.
- b. Subordinasi adalah bentuk penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin lainnya. Seperti diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan berperan dalam urusan domestik atau reproduksi, sedangkan laki-laki dalam urusan publik dan produksi.
- c. Pandangan stereotip atau pelabelan adalah gambaran standar tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai

dengan kenyataan empiris. Pelabelan negatif pada umumnya selalu melahirkan ketidaksetaraan. Salah satu stereotip yang berkembang adalah berdasarkan pengertian gender yang terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan.

- d. Kekerasan (*violence*) berarti tindakan kekerasan fisik atau non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.
- e. Beban kerja berarti satu jenis kelamin menerima lebih banyak pekerjaan dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan sering dianggap sebagai peran yang statis atau permanen. Ada anggapan bahwa perempuan secara alamiah memiliki sifat mengasuh, merawat, memelihara, dan rajin, sehingga pekerjaan rumah tangga hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, tetapi juga memainkan peran ganda dalam memikirkan pekerjaan karier mereka.

3. Pengukuran Ketimpangan Gender

Terkait pengukuran ketimpangan gender, UNDP menginformasikan dua indeks yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender, yaitu *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Index* (GEI). Kedua indeks ini dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dengan memberdayakan perempuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara. GDI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dan menjelaskan perkembangan nilai-nilai yang dicapai di bidang pendidikan, kesehatan dan masalah sosial. GEI adalah indeks yang berfokus pada partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan masyarakat (Nisak dan Yasa, 2021). Mengikuti kebijakan

UNDP, Indonesia menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk yang meliputi angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (AHL), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya dalam mencapai standar hidup layak. Sedangkan IDG menunjukkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik, indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan di parlemen, pengambilan keputusan yang dilihat dari posisi dan kedudukannya sebagai tenaga profesional dan ekonomi yang diukur melalui kontribusi pendapatan perempuan. IPG dan IDG memiliki rentang nilai 1 sampai 100. Semakin mendekati nilai 100, maka semakin rendah tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kertati, 2021).

Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan dalam mengukur ketimpangan gender. Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan GII sebagai salah satu alat ukur ketimpangan gender. Pada tahun 2017, BPS melakukan kajian mengenai penghitungan IKG yang mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dalam menyusun GII. Perbedaan antara GII UNDP dan IKG BPS terletak pada indikator yang digunakan. Pada dimensi kesehatan, UNDP menggunakan UNDP menggunakan angka kematian ibu/MMR sebagai indikator faktor risiko kematian ibu melahirkan dan tingkat fertilitas remaja/ABR sebagai indikator fertilitas remaja, sedangkan pada dimensi pemberdayaan, indikator pendidikan yang digunakan oleh UNDP adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP. Indikator yang digunakan oleh IKG dikelompokkan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan hanya dihitung dari penduduk perempuan, indikator dalam dimensi ini adalah proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi wanita berusia 15-49 tahun

Keterangan:

G_F : Indeks Perempuan

G_M : Indeks Laki-laki

$Faskes$: Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan

ULP : Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

PR_F : Persentase perempuan yang duduk di parlemen

PR_M : Persentase laki-laki yang duduk di parlemen

SE_F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA

SE_M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA

$TPAK_F$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja

$TPAK_M$: Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja

- b. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik untuk menghasilkan indeks yang terdistribusi secara merata. Agregasi dengan rata-rata harmonik dimaksudkan untuk menggambarkan ketidaksetaraan gender berdasarkan hubungan antara aspek-aspek IKG. Rumus untuk mengagregasi indeks laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

$$HARM(G_F, G_M) = \left[\frac{(G_F)^{-1} + (G_M)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

Keterangan:

$HARM(G_F, G_M)$: Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan

- c. Menghitung indeks untuk setiap dimensi dari rata-rata aritmatika indeks untuk dimensi laki-laki dan indeks untuk dimensi perempuan. Khusus untuk dimensi kesehatan, nilai indeks komposit tidak boleh ditafsirkan

sebagai rata-rata dari indeks perempuan dan laki-laki, tetapi sebagai setengah jarak dari norma yang ditetapkan untuk indikator kesehatan. Hal ini karena kesehatan reproduksi hanya berlaku untuk perempuan. Sedangkan nilai indeks kesehatan laki-laki dianggap 1. Rumus untuk indeks kesehatan adalah:

$$Kesehatan = \frac{\left(\left(\frac{0,01}{Faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP} + 1 \right) \right)}{2}$$

Rumus indeks pemberdayaan adalah:

$$Pemberdayaan = \left(\sqrt{PR_F \cdot SE_F} + \sqrt{PR_M \cdot SE_M} \right) / 2$$

Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah:

$$IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$$

Keterangan:

Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi

Pemberdayaan : Indeks pemberdayaan

IPK : Indeks pasar kerja

- d. Menghitung indeks seluruh dimensi, yang berfungsi sebagai standar acuan dalam menghitung ketimpangan pada tahap berikutnya. Dalam hal ini, indeks setiap dimensi dirata-ratakan secara geometris seperti pada rumus berikut:

$$G_{F,M} = \sqrt[3]{Kesehatan \cdot Pemberdayaan \cdot IPK}$$

Keterangan:

G_{F,M} : Indeks dimensi

- e. Perhitungan indeks komposit dilakukan dengan membandingkan indeks kesetaraan gender dengan standar acuan. Indeks Kesetaraan Gender adalah indeks komposit yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{\text{HARM}(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$$

- f. Penghitungan IKG dilakukan dengan mengurangi angka 1 (satu) dari hasil di atas. Nilai IKG 0 (nol) mencerminkan kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan berada pada tingkat optimal. Nilai 1 (satu) mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan menjadi tidak optimal karena adanya kesenjangan gender. Rumus IKG adalah nilai maksimum (yaitu 1) dikurangi indeks kesetaraan gender.

$$\text{IKG} = -1 \frac{\text{HARM}(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$$

Keterangan:

IKG : Indeks Kesetaraan Gender

$\text{HARM}(G_F, G_M)$: Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan

$G_{F,M}$: Indeks Dimensi

Nilai IKG adalah antara 0 dan 1. Nilai 0 mencerminkan kesetaraan gender yang sempurna, yang menghasilkan tingkat pencapaian pembangunan yang optimal. Nilai 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna, yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan karena ketidaksetaraan gender. Tabel 1 menggambarkan empat kategori IKG berdasarkan rentang nilainya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan manusia di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi nilai IKG di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan, yang berdampak pada penurunan pembangunan manusia secara keseluruhan. Pengelompokan kategori tersebut adalah:

Tabel 1. Kategori IKG Berdasarkan Rentang Nilai

Rentang Nilai	Kategori IKG
0-0,399	Rendah
0,400-0,449	Menengah Bawah
0,450-0,499	Menengah Atas
0,500-1	Tinggi

Sumber: Nugroho dan Clarissa, 2022

Dalam menghitung IKG terdapat beberapa keterbatasan, adapun beberapa keterbatasan dalam menghitung IKG antara lain: (1) Menggabungkan kesejahteraan (*well-being*) dengan pemberdayaan dalam satu ukuran, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda, (2) Dimensi kesehatan lebih menunjukkan kesulitan perempuan dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini bukan merupakan isu gender. Untuk negara berkembang, ketimpangan gender akan selalu tinggi, (3) Persentase perempuan di parlemen tidak memperhitungkan deviasi dari angka 50 persen, sehingga ketimpangan tidak terlihat, dan (4) Penggunaan rumus agregasi yang menggabungkan rata-rata geometrik, harmonik, dan aritmatik sulit untuk diinterpretasikan secara langsung (Nugroho dan Clarissa, 2022).

4. Ketimpangan Gender di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Covid-19

Menurut Minasyan *et al.*, (2019) ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan gender cukup besar terjadi di negara berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak terlepas dari isu ketidaksetaraan gender. Adika dan Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan gender merupakan bentuk diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Budaya masyarakat menginterpretasikan perbedaan biologis ini untuk menciptakan persyaratan sosial bagi kesesuaian

perilaku yang pada akhirnya memengaruhi hak, sumber daya, dan kekuasaan. Padahal, kesetaraan dan berkurangnya ketimpangan merupakan indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

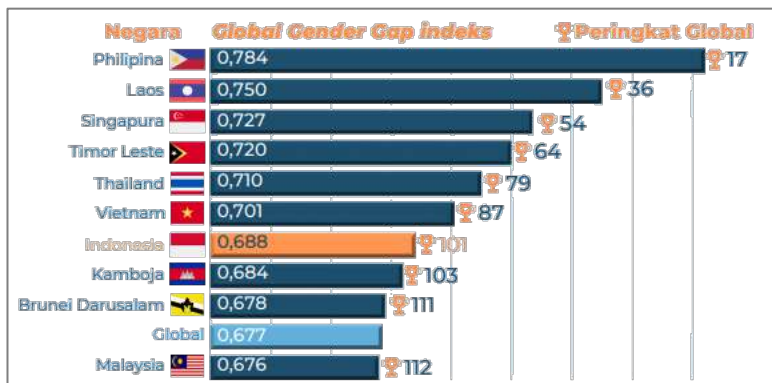
Dalam perspektif internasional, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia sebagai tujuan ke-5 SDGs "*Gender Equality*", yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan". Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 15 tahun atau pada tahun 2030 (Muhartono, 2020). Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini bertujuan agar semua program pembangunan nasional mengintegrasikan isu gender di dalamnya (Arjani, 2021). Namun pada kenyataannya, upaya pemerintah tersebut masih mengalami banyak tantangan dan permasalahan, terutama dengan masih adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan (Siscawati *et al.*, 2020).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak optimal pada pencapaian pembangunan manusia yang disebabkan oleh belum meratanya capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. IKG ini disusun oleh BPS dan merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII). Perbedaan GII UNDP dan IKG BPS terletak pada indikator yang digunakan. Dalam hal ketimpangan kesehatan, UNDP menggunakan angka kematian ibu (*maternal mortality rate*/MMR) sebagai indikator faktor risiko kematian ibu melahirkan dan tingkat fertilitas

remaja (*adolescent birth rate/ABR*) sebagai indikator fertilitas remaja. BPS menggunakan indikator proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan, sedangkan fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun. Pada dimensi pemberdayaan, indikator pendidikan yang digunakan oleh UNDP adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP, sementara BPS menggunakan batasan minimal SMA. Menurut UNDP ketimpangan gender Indonesia tahun 2022 berada pada peringkat ke 110 dari 170 negara (Nugroho dan Clarissa, 2022).

Kesetaraan gender merupakan kondisi yang harus dipenuhi oleh seluruh negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi ketimpangan gender tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. *Global Gender Gap Index* (GGGI) merupakan salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan gender di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dapat dilihat pada Gambar 6 menunjukkan GGGR tahun 2021 dari *World Economy Report* menunjukkan ketimpangan gender negara-negara di Asia Tenggara. GGGI antara 0-100, artinya semakin tinggi nilai indeksnya maka semakin tinggi kesetaraan gender suatu negara. Secara global, GGGI adalah 67,7 persen yang artinya rata-rata kesetaraan gender negara-negara di dunia hanya sekitar 67,7 persen atau hanya 67,7 persen kesenjangan gender yang baru bisa diatasi dari seluruh kesenjangan gender yang ada. Nilai GGGI Indonesia sebesar 68,8 persen artinya baru 68,8 persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Peringkat Indonesia adalah 7 dari 10 negara Asia Tenggara berdasarkan nilai GGGI. Peringkat Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara Filipina, Laos, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam, sedangkan negara

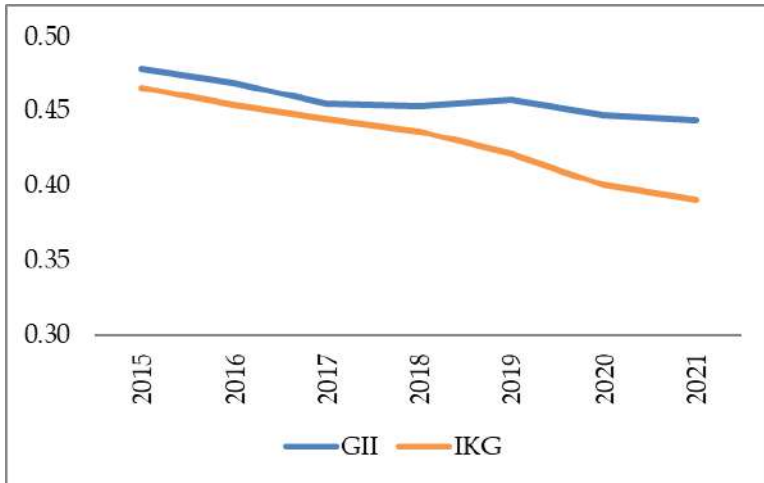
Kamboja, Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki peringkat di bawah Indonesia (KemenPPPA, 2022).



Gambar 6. *Global Gender Gap Index* Negara-negara Asia Tenggara, 2021
 Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Pada Gambar 7 memperlihatkan perbandingan ketimpangan gender di Indonesia yang diukur oleh GII UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) dengan IKG yang dihitung oleh BPS. Dari tahun 2015 hingga 2017, ketimpangan gender menurut GII UNDP dan IKG BPS memiliki tren yang hampir sama dan menunjukkan nilai yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2018 tren GII UNDP dan IKG BPS mulai melebar, hingga pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat tren keduanya semakin melebar. Pada tahun 2020 nilai GII UNDP sebesar 0,447, angka ini lebih tinggi dari IKG BPS yang sebesar 0,400. Capaian ini berlangsung hingga tahun 2021, GII UNDP mencapai 0,444 dan IKG BPS sebesar 0,390. Perbedaan capaian antara GII UNDP dan IKG BPS disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan, yaitu indikator proksi MMR, proksi ABR dan tingkat pendidikan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan, namun perempuanlah yang lebih banyak mengalami dampak negatif dari pandemi pada bidang ekonomi dan sosial, sehingga semakin memperburuk ketimpangan gender yang telah berkembang di masyarakat. Sejak awal pandemi, perempuan rentan dengan berbagai masalah, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian,

dipaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender, permasalahan tersebut akan menghambat terciptanya kesetaraan gender (Nastiti dan Harikesa, 2023).



Gambar 7. Perkembangan GII UNDP dan IKG BPS
Sumber: UNDP dan BPS Indonesia, 2015-2021 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan IKG di Indonesia. Pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, ketimpangan gender telah membaik yang ditunjukkan oleh penurunan IKG di hampir semua provinsi. Wilayah dengan IKG tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,543, sedangkan wilayah dengan IKG terendah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,081. Perbandingan ketimpangan gender tersebut sebesar 6,70 kali lipat. Kemudian, rata-rata IKG seluruh provinsi adalah 0,423.

Saat pandemi berlangsung pada tahun 2020, banyak provinsi yang mengalami penurunan IKG. Daerah dengan IKG tertinggi masih Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun nilainya turun dari tahun sebelumnya menjadi 0,531. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih menjadi daerah dengan IKG terendah dengan nilai 0,069. Rata-rata IKG pada masa pandemi turun dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 0,407. Kemudian, selisih antara IKG tertinggi dan

terendah terlihat meningkat menjadi 7,70 kali lipat. Wilayah dengan IKG paling terdampak pandemi adalah Provinsi Bali dengan rasio 139,36 persen, yang mengalami peningkatan IKG yang sangat drastis. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan IKG paling tidak terdampak pandemi yang ditunjukkan dengan penurunan IKG dengan nilai rasio sebesar 14,81 persen.

Setelah pelaksanaan program PEN, dapat dilihat bahwa disparitas kesetaraan gender antar provinsi mengalami penurunan, yang berarti terdapat perbaikan menuju kesetaraan. Daerah dengan IKG tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,506, sedangkan daerah dengan IKG terendah adalah Provinsi Bali sebesar 0,076. Rata-rata IKG pada tahun tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,393, rasio IKG tertinggi dan terendah sebesar 6,66 kali lipat. Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya merupakan daerah dengan IKG terendah yang terdampak pandemi, namun setelah penerapan kebijakan PEN, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang mengalami peningkatan IKG tertinggi dengan rasio sebesar 140,58 persen. Selanjutnya, daerah yang mengalami pemulihan IKG setelah penerapan kebijakan adalah Provinsi Bali yang sebelumnya juga merupakan daerah dengan IKG paling terdampak pandemi, namun setelah penerapan kebijakan PEN mengalami penurunan dengan selisih penurunan IKG sebesar 66,22 persen.

Tabel 2. Perkembangan IKG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	IKG (0-1)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
AC	0,438	0,417	0,398	-4,79	-4,56
SU	0,432	0,410	0,385	-5,09	-6,10
SB	0,429	0,390	0,352	-9,09	-9,74
RI	0,472	0,447	0,419	-5,30	-6,26
JA	0,525	0,505	0,496	-3,81	-1,78

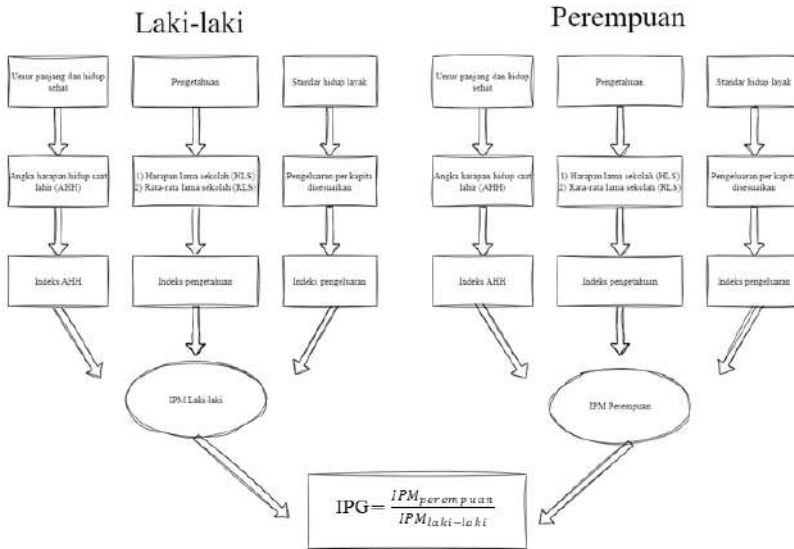
Provinsi	IKG (0-1)				
	2019	2020	2021	%Δ2020	%Δ2021
SS	0,457	0,433	0,433	-5,25	0,00
BE	0,495	0,459	0,457	-7,27	-0,44
LA	0,425	0,403	0,380	-5,18	-5,71
BB	0,497	0,439	0,406	-11,67	-7,52
KR	0,351	0,334	0,308	-4,84	-7,78
JK	0,186	0,166	0,151	-10,75	-9,04
JB	0,447	0,427	0,435	-4,47	1,87
JT	0,267	0,256	0,269	-4,12	5,08
YO	0,081	0,069	0,166	-14,81	140,58
JI	0,349	0,318	0,316	-8,88	-0,63
BT	0,452	0,431	0,421	-4,65	-2,32
BA	0,094	0,225	0,076	139,36	-66,22
NB	0,543	0,531	0,490	-2,21	-7,72
NT	0,430	0,416	0,376	-3,26	-9,62
KB	0,509	0,498	0,483	-2,16	-3,01
KT	0,494	0,494	0,482	0,00	-2,43
KS	0,469	0,451	0,438	-3,84	-2,88
KI	0,420	0,405	0,378	-3,57	-6,67
KU	0,447	0,417	0,416	-6,71	-0,24
SA	0,392	0,374	0,380	-4,59	1,60
ST	0,460	0,459	0,437	-0,22	-4,79
SN	0,402	0,354	0,319	-11,94	-9,89
SG	0,520	0,510	0,506	-1,92	-0,78
GO	0,391	0,390	0,386	-0,26	-1,03
SR	0,506	0,486	0,482	-3,95	-0,82
MA	0,502	0,487	0,473	-2,99	-2,87
MU	0,495	0,493	0,485	-0,40	-1,62
PB	0,495	0,477	0,479	-3,64	0,42
PA	0,506	0,478	0,480	-5,53	0,42

Provinsi	IKG (0-1)				
	2019	2020	2021	%Δ2020	%Δ2021
Minimum	0,081	0,069	0,076	-14,81	-66,22
Maksimum	0,543	0,531	0,506	139,36	140,58
Rasio	6,704	7,696	6,658		
Rata-rata	0,423	0,407	0,393		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)

B. Pembangunan Gender

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan pembangunan manusia adalah salah satu indikator seberapa baik pembangunan telah berjalan. Menurut Sen (1990), pembangunan manusia adalah gagasan yang luas yang mencakup hal-hal seperti kerja sama, kesetaraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Untuk menyederhanakan konsep yang sangat luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai *human development index* (HDI). Penghitungan HDI di Indonesia dilakukan penyesuaian berdasarkan indikator-indikator yang tersedia oleh BPS. Indeks yang telah disesuaikan tersebut dikenal dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut KemenPPPa (2023), gender adalah suatu hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dibangun. Peran gender bersifat tidak tetap dan berubah seiring waktu. IPG merupakan perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG lebih dikatakan sempurna jika nilainya mendekati 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti pencapaian pembangunan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada Gambar 8 ringkasan perhitungan IPG yang mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010.



Gambar 8. Metodologi Penghitungan IPG

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Metode lama maupun metode baru untuk menghitung IPG dapat memiliki perbedaan dalam pendekatan, variabel yang digunakan untuk masing-masing variabel. Metode lama untuk menghitung IPG didasarkan pada IPM yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Metode ini sering disebut sebagai IPG bergerak karena didasarkan pada pergerakan IPM dari dimensi kehidupan yang lebih tinggi ke dimensi yang lebih rendah, seperti di harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Sedangkan metode baru dalam menghitung IPG sering disebut IPG multidimensi. Metode ini lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak dimensi dan indikator untuk mengukur kesetaraan gender yang lebih luas. Metode baru ini mencoba menyelesaikan beberapa kelemahan dalam metode lama. Perbedaan IPG lama dan metode baru dapat di lihat Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jenis kelamin	IPG = rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • IPG harus dianalisis bersama IPM • Selisih IPG dengan IPM merupakan gap capaian gender • Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki • Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> • IPG dapat diinterpretasikan sendiri • Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki • IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki • IPG = 100, capaian perempuan sama laki-laki • IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Menurut BPS (2023), IPG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi penghitungan IPG, menggunakan UNDP tahun 2010 didasarkan pada tiga dimensi utama pembangunan gender. Pada Tabel 4 merupakan ringkasan dimensi IPG.

Tabel 4. Dimensi IPG

Dimensi	Indikator
Umur panjang dan sehat	Angka harapan hidup pada saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan
Pendidikan	1. Harapan lama sekolah (HLS) laki-laki dan perempuan

Dimensi	Indikator
	2. Rata-rata lama sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan
Pemberdayaan ekonomi	Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Dimensi umur panjang dan kesehatan mencakup indikator-indikator seperti angka harapan hidup pada kelahiran laki-laki dan perempuan memberikan gambaran tentang rata-rata usia bagi laki-laki dan perempuan, sementara indikator kematian ibu dan kematian anak menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan, akses terhadap perawatan yang tepat, serta faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak. Indikator umur panjang dan kesehatan ini membantu dalam mengenali ketidaksetaraan gender yang ada dan memberikan informasi penting untuk pengembangan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan baik untuk orang dewasa maupun anak-anak.

Dimensi pendidikan mencakup indikator-indikator seperti harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan (HLS) merupakan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan untuk diterima oleh seorang anak pada usia tertentu dimasa yang akan mendatang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kemungkinan seorang anak untuk bersekolah di sekolah di negara tersebut dan bahwa setiap tingkat pendidikan akan sama untuk semua negara yang bersangkutan. Rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan (RLS) merupakan jumlah tahun sekolah yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh sekolah formal. RLS dihitung dengan jumlah tahun yang telah diselesaikan di setiap tingkat pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Dimensi pemberdayaan ekonomi mencakup indikator-indikator seperti indikator partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah sejauh mana populasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik melalui

pekerjaan formal maupun informal. Indikator ini memberikan informasi tentang tingkat keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Indikator perbandingan penghasilan perempuan dan laki-laki adalah perbedaan rata-rata penghasilan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Indikator ini menggambarkan adanya ketidaksetaraan gender dalam hal upah. Indikator penghasilan dihitung dengan membagi rata-rata penghasilan perempuan dengan penghasilan laki-laki, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator penghasilan sangat penting untuk mengukur ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.

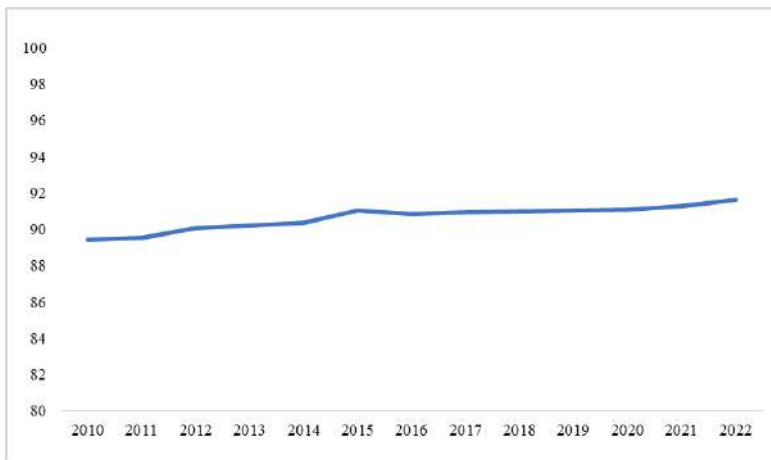
- **Pembangunan Gender di Indonesia**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi status kemampuan dasar penduduk, yang mencakup angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. IPG digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya yang mendukung standar hidup yang layak (Kertati, 2021). Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan dan peran perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. IDG mencerminkan partisipasi perempuan dalam kegiatan sehari-hari, terutama di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik, serta memberikan gambaran kondisi ekonomi saat ini (Lestari *et al.*, 2020).

Indonesia saat ini berada dalam tahapan bonus demografi, dimana kondisi struktur umur penduduk produktif cukup tinggi sehingga *dependency ratio* berada pada tingkat yang rendah. Manfaat optimal akan didapatkan dari bonus demografi bila sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah berada dalam kondisi optimal dari sisi kesehatan, kecerdasan dan pendidikan. Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia juga harus optimal dalam memanfaatkan kesehatannya, kecerdasannya dan pendidikannya, sehingga isu kesetaraan gender harus terintegrasi dalam proses pembangunan. Peningkatan peran perempuan berdampak

positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (KemenPPPA, 2022).

Data pada Gambar 9 menggambarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Pada tahun 2010, IPG mencapai 89,42, lalu mengalami peningkatan menjadi 91,03 pada tahun 2015. Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 90,82, tetapi kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali menjadi 90,96. Tren positif terus berlanjut, dengan IPG mencapai 91,63 pada tahun 2022.



Gambar 9. Perkembangan IPG di Indonesia Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Indonesia 2010-2021 (diolah)

Peran gender mencerminkan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat, di mana kegiatan, tugas, atau sikap yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dapat dibedakan (KemenPPPA, 2023). Untuk mengukur peran gender dalam masyarakat, digunakan indeks seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ini berperan penting dalam mengidentifikasi kesenjangan gender dan mengukur tingkat pemberdayaan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Rentang nilai dari 1 hingga 100 pada IPG mencerminkan tingkat ketidakesetaraan gender. Semakin mendekati nilai 100, semakin terlihat penurunan ketimpangan antara laki-laki dan

perempuan, menciptakan gambaran yang lebih seimbang dalam peran mereka dalam masyarakat.

IPG berfungsi sebagai gambaran kesetaraan gender dalam pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, masing-masing dengan indikator-indikator spesifik yang mencerminkan kondisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dengan mengukur kesenjangan antara keduanya di setiap dimensi, IPG memberikan nilai yang mencerminkan tingkat kesenjangan gender dalam pembangunan manusia.

Pada tahun 2010, Provinsi Jakarta mencapai nilai tertinggi dalam pembangunan gender sebesar 93,76, sementara Provinsi Papua memiliki nilai terendah, yaitu 73,93. Rata-rata nilai pembangunan gender pada tahun tersebut adalah 87,99. Pada tahun 2022, Provinsi Yogyakarta mencapai nilai tertinggi sebesar 94,99, sedangkan Provinsi Papua masih memiliki nilai terendah, yaitu 81,04. Meskipun nilai pembangunan gender Provinsi Papua meningkat setiap tahunnya, tetapi tetap menjadi yang terendah di antara provinsi lain (lihat Tabel 5).

Tingginya nilai IPG provinsi Yogyakarta dikarenakan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Yogyakarta yang sudah responsif gender antara lain bidang kesehatan terdapat jaminan persalinan (jampersal), sosialisasi reproduksi yang sarasannya adalah perempuan serta posyandu lansia. Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah provinsi Yogyakarta telah melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender sehingga mendukung penganggaran yang responsif gender sejak tahun 2008. Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah provinsi Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi yang masif terhadap orang tua yang memiliki anak usia sekolah terkait manfaat dan pentingnya pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan baik pada perempuan maupun laki-laki.

Pembangunan gender Provinsi Papua selalu tertinggal karena perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Indikator pendidikan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, mencerminkan perbedaan kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah. Faktor ekonomi juga berperan, di mana dalam kondisi rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi, orang tua cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Pada tahun 2022, nilai rata-rata pembangunan gender mencapai 90,76. Rasio perbandingan nilai pemberdayaan gender pada tahun 2010 berkisar antara 1,27 kali lipat (tertinggi) hingga 1,17 kali lipat pada tahun 2022 (terendah), dengan nilai rata-rata. Rasio ini mencerminkan variasi dalam pemberdayaan gender di antara provinsi-provinsi tersebut.

Tabel 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010-2022 di Indonesia

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2010	2022	% Δ IPG
AC	89,05	92,24	0,04
SU	89,43	91,06	0,02
SB	91,98	94,72	0,03
RI	85,17	88,71	0,04
JA	83,04	88,95	0,07
SS	89,73	92,95	0,04
BE	88,88	91,36	0,03
LA	87,18	90,58	0,04
BB	86,87	89,55	0,03
KR	92,05	93,50	0,02
JK	93,76	94,93	0,01
JB	86,94	89,80	0,03
JT	90,32	92,83	0,03
YO	92,82	94,99	0,02
JI	88,80	92,08	0,04

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2010	2022	% Δ IPG
BT	90,22	92,18	0,02
BA	90,90	94,36	0,04
NB	86,53	91,08	0,05
NT	90,06	92,96	0,03
KB	84,09	87,61	0,04
KT	88,02	89,20	0,01
KS	88,00	89,44	0,02
KI	83,00	86,61	0,04
KA		87,85	
SA	93,10	94,89	0,02
ST	91,23	92,24	0,01
SN	91,54	93,14	0,02
SG	87,90	91,04	0,04
GO	83,26	88,12	0,06
SR	87,53	89,79	0,03
MA	91,79	93,20	0,02
MU	85,29	90,30	0,06
PB	81,15	83,61	0,03
PA	73,93	81,04	0,10
Minimum	73,93	81,04	0,01
Maksimum	93,76	94,99	0,10
Rasio	1,27	1,17	8,69
Rata-rata	87,99	90,79	0,03

Catatan: IPG pada tahun 2010-2013 tidak tersedianya data pada Provinsi Kalimantan Utara pada waktu itu.

Sumber: BPS Indonesia, 2010-2022 (diolah)

Tabel 6 menunjukkan perkembangan IPG di Indonesia. Pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, wilayah dengan IPG tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai IPG sebesar 94,77. Sementara itu, wilayah dengan

IPG terendah adalah Provinsi Papua dengan nilai IPG sebesar 80,05. Kemudian, rata-rata IPG seluruh provinsi sebesar 90,28 dengan rasio IPG tertinggi dan terendah sebesar 1,18 kali lipat.

Selama masa pandemi 2020, beberapa daerah mengalami peningkatan IPG, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai IPG tertinggi selama masa pandemi yaitu sebesar 94,80, lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Sementara itu, daerah dengan IPG terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua dengan nilai 79,59. Rata-rata IPG secara keseluruhan pada tahun tersebut adalah 90,23 dengan rasio IPG tertinggi dan terendah sebesar 1,19 kali lipat. Wilayah dengan IPG paling terdampak pandemi, yaitu Provinsi Papua dengan nilai rasio sebesar 0,57 persen, di mana wilayah tersebut mengalami penurunan IPG yang sangat drastis. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan IPG yang paling sedikit terdampak pandemi, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPG dengan nilai rasio sebesar 0,32 persen.

Selanjutnya, dengan pelaksanaan program PEN, pemulihan nilai IPG mengalami peningkatan yang cukup baik, IPG dengan kategori nilai tertinggi berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 94,88, sedangkan daerah dengan nilai IPG terendah sesudah pandemi masih ditempati oleh Provinsi Papua dengan nilai IPG 80,16. Rata-rata nilai IPG nasional adalah 90,41 dengan rasio 1,18 kali lipat. Perbandingan sebelum dan sesudah pandemi menunjukkan bahwa masih ada empat provinsi yang mengalami penurunan IPG, antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 6. Perkembangan IPG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	IPG (1-100)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
AC	91,84	92,07	92,23	0,25	0,17
SU	90,71	90,67	90,73	-0,04	0,07
SB	94,09	94,17	94,34	0,09	0,18
RI	88,43	88,14	88,38	-0,33	0,27
JA	88,44	88,41	88,62	-0,03	0,24
SS	92,40	92,38	92,35	-0,02	-0,03
BE	91,19	91,00	91,16	-0,21	0,18
LA	90,39	90,33	90,37	-0,07	0,04
BB	89,00	88,92	89,11	-0,09	0,21
KR	93,10	93,31	93,49	0,23	0,19
JK	94,71	94,63	94,84	-0,08	0,22
JB	89,26	89,20	89,36	-0,07	0,18
JT	91,89	92,18	92,48	0,32	0,33
YO	94,77	94,80	94,88	0,03	0,08
JI	90,91	91,07	91,67	0,18	0,66
BT	91,67	91,74	91,83	0,08	0,10
BA	93,72	93,79	94,01	0,07	0,23
NB	90,40	90,45	90,53	0,06	0,09
NT	92,72	92,73	92,63	0,01	-0,11
KB	86,81	86,87	86,95	0,07	0,09
KT	89,09	89,03	88,79	-0,07	-0,27
KS	88,61	88,86	88,86	0,28	0,00
KI	85,98	85,70	85,95	-0,33	0,29
KU	87,00	86,67	87,30	-0,38	0,73
SA	94,53	94,42	94,61	-0,12	0,20
ST	92,01	91,87	91,91	-0,15	0,04
SN	93,09	92,86	92,85	-0,25	-0,01
SG	90,56	90,50	90,68	-0,07	0,20

Provinsi	IPG (1-100)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
GO	86,83	86,73	87,50	-0,12	0,89
SR	89,76	89,43	89,57	-0,37	0,16
MA	93,04	92,97	93,19	-0,08	0,24
MU	89,61	89,55	89,75	-0,07	0,22
PB	82,74	82,91	83,00	0,21	0,11
PA	80,05	79,59	80,16	-0,57	0,72
Minimum	80,05	79,59	80,16	-0,57	-0,27
Maksimum	94,77	94,80	94,88	0,32	0,89
Rasio	1,18	1,19	1,18		
Rata-rata	90,28	90,23	90,41		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)

C. Pemberdayaan Gender

Menurut BPS (2023), Indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Metodologi IDG masih didasarkan pada metodologi lama hingga indeks ketidakesetaraan gender (IKG) dapat tercapai. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat digolongkan menjadi rendah ($IDG < 50$), sedang ($50 \leq IDG < 60$), tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$), sangat tinggi ($IDG > 80$). Pada Tabel 7 merupakan ringkasan dimensi IPG.

Tabel 7. Dimensi IDG

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerjaan profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Dimensi keterwakilan di parlemen yang mencakup indikator-indikator seperti proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan. Indikator ini mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan dalam bidang politik. Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen dapat menggambarkan tingkat representasi bidang politik dan pemberdayaan gender dalam proses penting kebijakan dan pembangunan negara.

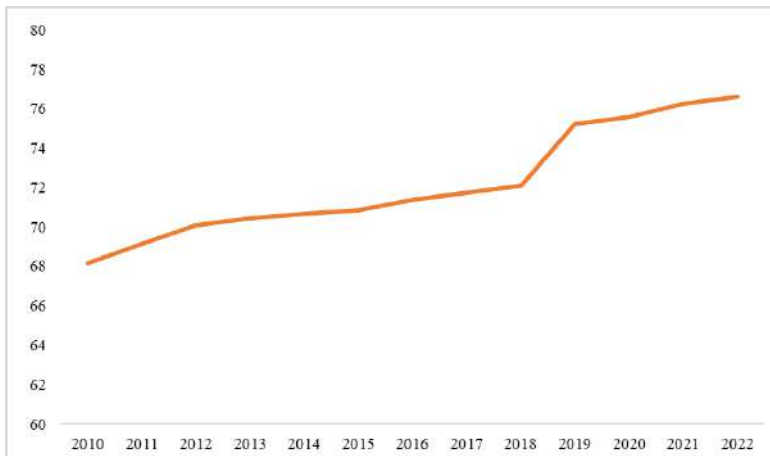
Dimensi pengambilan keputusan yang mencakup indikator-indikator seperti proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan. Proporsi keterwakilan perempuan di peran manajer menggambarkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki ke posisi kepemimpinan yang penting. Selain itu, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi serta karyawan laki-laki memberikan gambaran tentang keterlibatan perempuan dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Dimensi ini penting untuk menganalisis kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tempat kerja dan keadilan gender.

Dimensi distribusi pendapatan yang mencakup indikator-indikator seperti upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Dimensi ini menggambarkan perbedaan upah perempuan dan laki-laki di sektor non-pertanian. Dengan indikator ini dapat dilihat sejauh mana kesenjangan upah yang terjadi. Dimensi ini penting untuk menganalisis ketidakadilan ekonomi dan kesetaraan gender dalam distribusi pendapatan, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk upaya-upaya dalam mencapai upah yang adil dan kesetaraan ekonomi bagi laki-laki dan perempuan.

IDG berfokus pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Untuk melakukan perhitungan IDG, digunakan metode *gender empowerment measure* (GEM) hingga IKG dapat dihitung.

- **Pemberdayaan Gender di Indonesia**

Data pada Gambar 10 mencantumkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Pada tahun 2010, IDG berada pada angka 68,15 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, IDG mencapai 76,59. Peningkatan IDG menunjukkan perkembangan dalam keterlibatan dan peran perempuan di berbagai bidang, seperti politik dan ekonomi, selama periode tersebut. Angka tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu (1) persentase parlemen, (2) persentase tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi serta (3) sumbangan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk pada parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,74 persen dibandingkan 78,26 persen. Komposisi tenaga kerja manager, profesional, administrasi maupun teknisi sudah cukup seimbang. Namun demikian, sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki sebesar 62,83 persen sedangkan perempuan sebesar 37,17 persen.



Gambar 10. Perkembangan IDG di Indonesia Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Indonesia 2010-2021 (diolah)

IDG digunakan untuk menilai keterlibatan peran aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator gender ini berperan sebagai alat untuk mengevaluasi capaian hasil pembangunan

berbasis gender, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Tanzuha *et al.*, 2021).

Nilai pemberdayaan gender tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tabel 8 memperlihatkan pada tahun 2010 nilai pemberdayaan gender tertinggi di Provinsi Yogyakarta sebesar 77,70. Sedangkan pemberdayaan gender terendah berada di Provinsi Aceh yaitu 53,40. Pada tahun 2022 nilai pemberdayaan gender tertinggi berada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 81,98. Sedangkan pemberdayaan gender terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 53,47. Rasio perbandingan nilai pemberdayaan gender pada tahun 2010 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 1,46 kali lipat dengan rata-rata. Rasio perbandingan nilai pemberdayaan gender pada tahun 2022 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 1,53 kali lipat dengan rata-rata. Rata-rata pemberdayaan gender pada tahun 2010 adalah 63,42 dan pada tahun 2022 yaitu 70,50.

Tabel 8. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010-2022 di Indonesia

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2010	2022	%ΔIDG
AC	53,40	63,92	0,20
SU	67,78	69,33	0,02
SB	63,04	65,48	0,04
RI	65,14	71,16	0,09
JA	57,91	67,86	0,17
SS	67,32	74,89	0,11
BE	68,50	70,13	0,02
LA	65,32	68,24	0,04
BB	55,62	58,20	0,05
KR	56,70	59,05	0,04
JK	73,23	75,30	0,03

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2010	2022	%ΔIDG
JB	67,01	71,22	0,06
JT	67,96	73,78	0,09
YO	77,70	76,87	-0,01
JI	67,91	74,42	0,10
BT	65,66	68,55	0,04
BA	58,53	72,29	0,24
NB	54,49	53,47	-0,02
NT	57,98	75,22	0,30
KB	55,26	73,18	0,32
KT	68,62	81,98	0,19
KS	62,53	74,80	0,20
KI	60,05	66,89	0,11
KA		61,92	
SA	71,20	78,99	0,11
ST	65,37	77,52	0,19
SN	62,46	76,37	0,22
SG	64,26	73,72	0,15
GO	61,35	71,20	0,16
SR	63,15	66,55	0,05
MA	75,94	74,99	-0,01
MU	58,17	78,99	0,36
PB	57,97	61,93	0,07
PA	55,42	68,66	0,24
Minimum	53,40	53,47	-0,02
Maksimum	77,70	81,98	0,36
Rasio	1,46	1,53	-19,12
Rata-rata	63,42	70,50	0,12

Catatan: IDG pada tahun 2010-2013 tidak tersedianya data pada Provinsi Kalimantan Utara pada waktu itu.

Sumber: BPS Indonesia, 2010-2022 (diolah)

Tabel 9 menunjukkan perkembangan IDG di Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar nilai IDG cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, wilayah dengan nilai IDG tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 83,20. Sementara itu, nilai IDG terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 51,91. Selanjutnya, rata-rata IDG nasional sebesar 69,23 dengan rasio IDG tertinggi dan terendah sebesar 1,60 kali lipat.

Kemudian setelah pandemi pada tahun 2020, sebagian besar nilai IDG di hampir seluruh provinsi mengalami penurunan, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan IDG tertinggi yaitu 75,43 dan Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan IDG terendah yaitu 47,37. Rasio IDG tertinggi dan terendah adalah 1,59 kali lipat dengan rata-rata IDG nasional sebesar 62,31 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selama masa pandemi, hanya beberapa provinsi yang mempertahankan nilai IDG dan mengalami peningkatan, untuk wilayah dengan penurunan IDG tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dengan rasio penurunan sebesar 29,79 persen. Sementara itu, wilayah dengan peningkatan IDG tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan rasio peningkatan sebesar 12,30 persen.

Penerapan kebijakan PEN pada masa pandemi telah membantu meningkatkan IDG di beberapa provinsi, namun terlihat masih cukup banyak daerah yang mengalami penurunan nilai IDG. Kategori nilai IDG tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 75,66, sedangkan daerah dengan nilai IDG terendah setelah pandemi masih ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai IDG sebesar 47,84. Rata-rata nilai IDG nasional adalah 62,26 dengan rasio 1,58 kali. Wilayah dengan peningkatan IDG terbaik adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rasio 2,70 persen, disusul beberapa provinsi lainnya. Sementara itu, wilayah dengan penurunan IDG tertinggi masih berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan rasio 8,48 persen.

Tabel 9. Perkembangan IDG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	IDG (1-100)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
AC	63,31	63,47	63,24	0,25	-0,36
SU	67,76	64,65	64,95	-4,59	0,46
SB	59,09	59,83	59,65	1,25	-0,30
RI	69,17	56,41	55,87	-18,45	-0,96
JA	65,97	58,83	58,10	-10,82	-1,24
SS	74,45	52,27	47,84	-29,79	-8,48
BE	69,78	71,39	71,82	2,31	0,60
LA	69,23	57,22	56,69	-17,35	-0,93
BB	52,96	47,37	48,11	-10,56	1,56
KR	61,59	65,69	66,02	6,66	0,50
JK	75,14	57,98	58,17	-22,84	0,33
JB	69,48	52,00	51,27	-25,16	-1,40
JT	72,18	52,60	52,30	-27,13	-0,57
YO	73,59	56,49	56,76	-23,24	0,48
JI	73,04	73,50	75,01	0,63	2,05
BT	68,83	61,56	61,74	-10,56	0,29
BA	72,27	58,27	58,42	-19,37	0,26
NB	51,91	52,58	52,53	1,29	-0,10
NT	73,37	55,32	55,04	-24,60	-0,51
KB	68,07	63,59	62,42	-6,58	-1,84
KT	83,20	75,43	75,66	-9,34	0,30
KS	74,60	65,34	65,47	-12,41	0,20
KI	65,65	57,93	58,26	-11,76	0,57
KU	61,48	69,04	68,91	12,30	-0,19
SA	79,10	67,52	67,79	-14,64	0,40
ST	74,49	62,03	60,33	-16,73	-2,74
SN	76,01	70,01	71,90	-7,89	2,70
SG	71,40	69,61	69,25	-2,51	-0,52
GO	70,67	74,05	74,39	4,78	0,46
SR	65,92	65,84	66,36	-0,12	0,79
MA	75,77	60,07	59,51	-20,72	-0,93

Provinsi	IDG (1-100)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
MU	77,50	71,52	71,96	-7,72	0,62
PB	61,52	67,48	68,54	9,69	1,57
PA	65,37	61,49	62,40	-5,94	1,48
Minimum	51,91	47,37	47,84	-29,79	-8,48
Maksimum	83,20	75,43	75,66	12,30	2,70
Rasio	1,60	1,59	1,58		
Rata-rata	69,23	62,31	62,26		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)



3

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan proses perekonomian dalam suatu negara secara berkesinambungan ke arah yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Yasin, 2020). Perekonomian dapat dikatakan tumbuh apabila diikuti dengan peningkatan pada sektor ekonomi. Laju pertumbuhan pendapatan menandakan bahwa perekonomian di suatu wilayah mengalami perkembangan dan apabila terjadi perlambatan maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mengalami kesulitan, apabila suatu wilayah mengalami perlambatan ekonomi maka dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya dan apabila terjadi pertumbuhan pada sektor ekonomi maka tentunya akan berdampak positif bagi wilayah tersebut (Koilam *et al.*, 2023).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terwujud karena adanya kesinambungan dari seluruh aktivitas masyarakat. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan menjual, membeli, memproduksi, atau berinvestasi, hingga ekspor dan impor (Putri, 2023). Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Peningkatan kapasitas tersebut ditentukan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologi atau penyesuaian terhadap berbagai tuntutan situasi yang ada (Hendri dan Iswandi, 2022).

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perkembangannya, terdapat banyak pandangan yang muncul dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi yang kemudian menghasilkan berbagai teori yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori pertumbuhan Solow-Swan, yang juga dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Teori ini menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya perkembangan teknologi modern, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Leasiwal, 2022). Pada model Solow-Swan, fungsi produksi yang digunakan dapat menyubstitusikan antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Fungsi produksi tersebut memiliki sifat *constant returns to scale*, yaitu jika terjadi peningkatan dengan persentase yang sama pada semua faktor produksi, maka *output* akan meningkat dengan persentase yang sama. Sehingga, jika terjadi peningkatan modal dan tenaga kerja sebesar 10 persen, maka *output* akan meningkat sebesar 10 persen (Cangiotti dan Sensi, 2020).

2. Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Konsep pertumbuhan endogen atau model pertumbuhan Romer yang dikembangkan pada tahun 1986, dalam teori pertumbuhan endogen didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pengembangan teknologi. Model yang paling populer dari jenis ini menyatakan bahwa penemuan-penemuan disengaja dan menghasilkan limpahan teknologi yang

menurunkan biaya inovasi di masa depan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Tentu saja dalam model ini, tenaga kerja yang terdidik memainkan peran khusus dalam menentukan tingkat inovasi teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah melalui investasi modal, pendidikan, penelitian dan pengembangan (Nasution *et al.*, 2020).

B. Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Prawoto (2019) menjelaskan bahwa faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, artinya dapat berlaku dan tidak berlaku jika diterapkan pada kondisi perekonomian yang berbeda, faktor-faktor tersebut memengaruhi pembangunan dan taraf hidup, serta menjadi acuan bagi negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, beberapa faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Sumber-sumber daya alam: Sumber daya alam memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena dapat menarik investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor produktif sehingga menghasilkan *output* produksi yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, juga dapat meningkatkan dan memperluas produksi untuk diperdagangkan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu dengan melakukan ekspor.
2. Kualitas sumber daya manusia: Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat dicapai jika penduduk dapat diserap ke dalam angkatan kerja dan menerima pelatihan kerja, pendampingan, dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengeksplorasi sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif.
3. Akumulasi kapital dan penerapan teknologi: Pentingnya teknologi modern dalam mendorong aktivitas ekonomi terbukti baik di negara maju maupun negara berkembang. Metode tradisional mungkin tidak efektif dalam mencapai produktivitas yang optimal. Teknologi modern sangat penting

untuk menghasilkan produk yang lebih efisien dan kompetitif. Penggunaan teknologi modern dalam mendorong kegiatan ekonomi akan meningkatkan konsumsi energi dan produktivitas yang lebih baik secara keseluruhan.

4. Kondisi sosial masyarakat: Kondisi sosial suatu masyarakat dapat menentukan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Banyak orang menggunakan metode tradisional untuk manajemen ekonomi, yang cenderung menghambat peningkatan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa kondisi ini terpenuhi dan mendorong pendidikan bagi masyarakat, memastikan bahwa pengembangan keterampilan dan teknologi dapat diakses oleh semua orang.

C. Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mirna dan Sandy (2017) ada beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain:

1. Permodalan: Sumber modal domestik berasal dari tabungan masyarakat. Besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan, stabilnya nilai uang dan tersedianya sarana dan cara untuk melaksanakan tabungan tersebut. Modal dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam pembangunan. Ketika pendapatan per kapita rendah, maka proses pembentukan modal menjadi lambat. Akibatnya, sumber utama pembentukan modal adalah tabungan pemerintah dan bantuan luar negeri.
2. Iklim dan keadaan alam: Pembangunan ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya khususnya Indonesia masih sangat tergantung pada struktur agraris. Demikian juga dengan sumber daya alam yang tersedia dapat menghambat pembangunan, karena masyarakat hanya mengandalkan pasokan sumber daya alam yang tersedia. Dengan kata lain, persediaan sumber daya alam yang cukup membuat masyarakat terlena dan tidak merasa tertantang untuk bekerja keras.

3. Penduduk dan ketenagakerjaan: Pengembangan dapat berjalan dengan baik jika tersedia tenaga ahli yang memadai. Untuk itu, bantuan tenaga ahli dari luar dalam jumlah terbatas masih diperlukan, terutama dalam mempercepat proses alih teknologi. Konsekuensi lain dari kekurangan tenaga kerja terampil adalah terbatasnya kemampuan mengolah sumber daya alam.
4. Politik: Stabilitas politik suatu negara menentukan kelancaran proses pembangunan. Banyak uang yang dihabiskan untuk operasi pemulihan keamanan, belum lagi kerugian materi dan nyawa.
5. Sistem sosial dan kemasyarakatan: Kondisi objektif bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, agama/kepercayaan. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah dan kesalahpahaman yang berarti menghambat pembangunan.

D. Hubungan Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa ketimpangan gender berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Kim *et al.*, (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana aspek ketidaksetaraan gender terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengurangan ketidaksetaraan gender berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ketidaksetaraan gender dapat dihilangkan, maka pendapatan per kapita akan meningkat 30,2 persen lebih tinggi dari kondisi awal perekonomian setelah satu generasi dan 71,1 persen lebih tinggi setelah dua generasi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bertay *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa dalam industri di mana andil perempuan tinggi, menyebabkan industri tumbuh relatif lebih cepat apabila dibarengi dengan adanya persamaan gender. Dengan memfokuskan penelitian pada perbedaan efek dari ketidaksetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi antar

negara dan antar jenis industri pada komposisi gender yang berbeda, didapatkan kesimpulan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki *causal effect* terhadap capaian riil hasil ekonomi pada level industri. Semakin tinggi kesetaraan gender akan semakin tinggi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni dengan mengalokasikan tenaga kerja wanita pada sektor produktif.

Kangile *et al.* (2021) memberikan kesimpulan bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan daya saing dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender menyiratkan kesempatan, tanggung jawab, dan hak yang sama bagi laki-laki dan untuk meningkatkan pemerataan manfaat, sehingga berkontribusi pada kesetaraan gender serta peningkatan mata pencaharian. Peningkatan mata pencaharian menyiratkan peningkatan akses ke peluang ekonomi dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan untuk hidup. Hal ini memiliki kontribusi langsung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kemiskinan, kelaparan, lapangan kerja, pelestarian lingkungan, dan kesetaraan gender (Glazebrook dan Opoku, 2020).

Sari (2021) melakukan penelitian mengenai *gender inequality* terhadap pendapatan per kapita di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2019, menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel IPM, IPG, upah perempuan, TPAK perempuan, dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita riil di 33 provinsi di Indonesia. Lain halnya dengan variabel IDG yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita riil di 33 provinsi di Indonesia.

Lusiarista dan Arif (2022) melakukan penelitian mengenai peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Karesidenan Pati periode 2015-2020, menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel IDG, sumbangan pendapatan perempuan dan RLS berpengaruh secara positif dan signifikan, variabel keterlibatan perempuan di parlemen berpengaruh positif namun tidak

signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di wilayah Karesidenan Pati. Selanjutnya, variabel IPG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di wilayah Karesidenan Pati.

Wulandari dan Arif (2022) melakukan penelitian mengenai pembangunan ekonomi di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2014-2020 berdasarkan peran perempuan terhadap PDRB, menggunakan model regresi data panel. Hasil estimasi menyebutkan bahwa variabel AHH perempuan dan RLS perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Provinsi Bali. Sedangkan variabel IPG berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Bali.

Sitorus (2016) melakukan penelitian yang berjudul dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk, RLS perempuan terhadap laki-laki, TPAK perempuan terhadap laki-laki, keterbukaan perdagangan (*openness*), IPM dan IPG secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan. Sedangkan variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Nazmi dan Jamal (2018) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan variabel IPG berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Infarizki *et al.*, (2018) melakukan penelitian di wilayah Karesidenan Kedu yang berjudul analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap produk domestik regional bruto di Jawa Tengah tahun 2010-2018, menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel RLS laki-laki dan perempuan, AHH laki-laki dan perempuan, TPAK laki-laki dan perempuan serta IDG secara bersama-sama berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah khususnya di wilayah Karesidenan Kedu.

Fauziyah dan Juliprijanto (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendidikan antar gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1971-2014, menggunakan *error correction model* (ECM). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel perubahan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berpengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek terhadap PDRB di Indonesia. Sedangkan variabel persentase angkatan kerja perempuan terhadap total angkatan kerja (FLABOR), persentase jumlah penduduk perempuan yang menempuh pendidikan primer dan sekunder dibandingkan dengan penduduk laki-laki (GPI), serta persentase perubahan manufaktur penambahan pengolahan barang (MANUF) berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang namun berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek terhadap PDRB di Indonesia.

Napitupulu dan Ekawaty (2022) menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 negara Asia Timur dan Pasifik pada periode 2006-2020, menggunakan metode analisis regresi data panel. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa variabel indeks ketimpangan gender pada bidang partisipasi dan peluang ekonomi (PPE), indeks ketimpangan gender pada bidang pencapaian pendidikan (PPD), dan indeks ketimpangan gender pada bidang pemberdayaan politik (PPL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Sedangkan variabel indeks ketimpangan gender pada bidang kesehatan dan kelangsungan hidup (KKH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB di negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

Adika dan Rahmawati (2021) melakukan analisis yang bertujuan untuk melihat hubungan indikator ketimpangan gender dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia pada periode 2015-2020, menggunakan model regresi linier berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel AHH, RLS dan Pengeluaran per kapita dengan dari perempuan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Sedangkan pada laki-laki hanya variabel pengeluaran per kapita yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPEI. Sehingga apabila dibandingkan peningkatan variabel bebas dari perempuan lebih berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan IPEI di Indonesia dibandingkan peningkatan dari variabel laki-laki.

Aliyah (2022) menelaah relasi *gender equality* terhadap pertumbuhan ekonomi di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2010-2018 menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel TPAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel RLS dan AHH secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Deris *et al.*, (2022) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (34 provinsi) tahun 2015-2020, menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel RLS perempuan terhadap laki-laki dan TPAK perempuan terhadap laki-laki secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan variabel AHH perempuan terhadap laki-laki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hidayah dan Rahmawati (2020) melakukan penelitian yang berjudul menelusur relasi indikator indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (Provinsi Jawa Timur), menggunakan metode analisis *ordinary least square* (OLS). Hasil estimasi menyebutkan bahwa variabel AHH perempuan dan laki-laki serta RLS perempuan dan laki-laki secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel TPAK perempuan dan laki-laki yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 10 Menampilkan ringkasan hasil studi mengenai hubungan gender dengan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 10. Ringkasan Studi Gender dan Pertumbuhan Ekonomi

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Sari (2021)	<i>Gender Inequality: Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia 2011-2019)</i>	<p>Variabel: Variabel Bebas: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Upah Perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, dan Pertumbuhan Penduduk</p> <p>Variabel Terikat: Pendapatan per kapita riil</p> <p>Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2011-2019 <i>Cross Section:</i> 33 provinsi di Indonesia</p> <p>Metode Analisis: Model regresi data panel</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPM +S 2. IPG +S 3. IDG - 4. Upah perempuan +S 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan +S 6. Pertumbuhan penduduk +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
2	Lusiarista dan Arif (2022)	Peran Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Pati Periode 2015-2020	<p>Variabel:</p> <p>Variabel Bebas: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Sumbangan Pendapatan Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan</p> <p>Variabel Terikat: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p> <p>Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2015-2020 <i>Cross Section:</i> 6 kabupaten di wilayah Karesidenan Pati</p> <p>Metode Analisis: Regresi model data panel</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPG - 2. IDG + 3. Sumbangan Pendapatan Perempuan +S 4. Keterlibatan Perempuan di Parlemen + 5. RLS +S
3	Wulandari dan Arif (2022)	Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali Periode 2014-2020 Berdasarkan	<p>Variabel:</p> <p>Variabel Bebas: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Harapan</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPG + 2. AHH +S 3. RLS +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		Peran Perempuan Terhadap PDRB	<p>Hidup (AHH) perempuan dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan</p> <p>Variabel Terikat: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p> <p>Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2014-2020 <i>Cross Section:</i> 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali</p> <p>Metode Analisis: Model regresi data panel</p>	
4	Sitorus (2016)	Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	<p>Variabel: Variabel Bebas: Investasi, Pertumbuhan Penduduk, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap laki-laki, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap laki-laki, Keterbukaan Perdagangan (openness),</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi – 2. Pertumbuhan Penduduk +S 3. RLS +S 4. TPAK +S 5. Keterbukaan Perdagangan +S 6. IPM +S 7. IPG +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>Variabel Terikat: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2003-2012 <i>Cross Section:</i> 30 provinsi di Indonesia</p> <p>Metode Analisis: Model regresi data panel</p>	
5	Nazmi dan Jamal (2018)	Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	<p>Variabel Bebas: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>Variabel Terikat: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p> <p>Jenis Data: <i>Time series:</i> 2013-2014</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPG + 2. IPM +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			<p><i>Cross Section</i>: 34 provinsi di Indonesia</p> <p>Metode Analisis: Model regresi linear berganda</p>	
6	Infarizki <i>et al.</i> (2018)	<p>Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Jawa Tengah Tahun 2010-2018 (Studi Penelitian Di Wilayah Karesidenan Kedu)</p>	<p>Variabel:</p> <p>Variabel Bebas: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender</p> <p>Variabel Terikat: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p> <p>Jenis Data:</p> <p><i>Time Series</i>: 2010-2018</p> <p><i>Cross Section</i>: 6 wilayah di wilayah Karesidenan</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RLS +S 2. AHH +S 3. TPAK +S 4. IDG +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			Kedu di Jawa Tengah Metode Analisis: Model regresi data panel	
7	Fauziyah dan Juliprijanto (2022)	Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Antar Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Variabel: Variabel Bebas: Perubahan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), presentase angkatan kerja perempuan terhadap total angkatan kerja (FLABOR), presentase jumlah penduduk perempuan yang menempuh pendidikan primer dan sekunder dibandingkan dengan penduduk laki-laki (GPI), presentase perubahan manufaktur penambahan pengolahan barang (MANUF) Variabel Terikat: Gross	Hasil Penelitian: 1. FLABOR +S dalam jangka panjang namun -S dalam jangka pendek 2. GPI +S dalam jangka panjang namun -S dalam jangka pendek 3. MANUF +S dalam jangka panjang namun -S dalam jangka pendek 4. PMTB +S dalam jangka panjang dan +S dalam jangka pendek

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			Domestic Product (GDP) Jenis Data: <i>Time Series:</i> 1971-2014 Metode Analisis: <i>Error Correction Model (ECM)</i>	
8	Napitupulu dan Ekawaty (2022)	Ketimpangan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Pada Negara-Negara Asia Timur Dan Pasifik	Variabel: Variabel Bebas: Indeks ketimpangan gender pada bidang Partisipasi dan Peluang Ekonomi (PPE), Indeks ketimpangan gender pada bidang Pencapaian Pendidikan (PPD), Indeks ketimpangan gender pada bidang Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (KKH) dan Indeks ketimpangan gender pada bidang Pemberdayaan Politik (PPL)	Hasil Penelitian: 1. PPE +S 2. PPD +S 3. KKH –S 4. PPL +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			<p>Variabel Terikat: Produk Domestik Bruto</p> <p>Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2006-2020 <i>Cross Section:</i> 15 negara Asia Timur dan Pasifik yaitu Australia, Brunei Darussalam, Jepang, Filipina, Indonesia, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam.</p> <p>Metode Analisis: Model regresi data panel</p>	
9	Adika dan Rahmawati (2021)	Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia	<p>Variabel:</p> <p>Variabel Bebas: Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki serta perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki serta perempuan, dan Pengeluaran per</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>1. AHH Perempuan +S Laki-laki -</p> <p>2. RLS Perempuan +S Laki-laki -</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			kapita laki-laki serta perempuan Variabel Terikat: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2015-2020 <i>Cross Section:</i> 34 provinsi di Indonesia Metode Analisis: Model regresi linier berganda	3. Pengeluaran per kapita Perempuan +S Laki-Laki +S
10	Aliyah (2022)	Menelaah Relasi Gender Equality Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah	Variabel: Variabel Bebas: Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki Variabel Terikat: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2010-2018	Hasil penelitian: 1. RLS -S 2. AHH -S 3. TPAK +

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
			<p><i>Cross Section:</i> 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Metode Analisis: Model regresi linier berganda</p>	
11	Deris <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-2020	<p>Variabel:</p> <p>Variabel Bebas: Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan terhadap laki laki, Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap laki laki, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap laki laki</p> <p>Variabel Terikat: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Jenis Data:</p> <p><i>Time Series:</i> 2015-2020</p> <p><i>Cross Section:</i> 34 provinsi di Indonesia</p> <p>Metode Analisis: Model regresi data panel</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AHH - 2. RLS +S 3. TPAK +S

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
12	Hidayah dan Rahmawati (2020)	Menelusur Relasi Indikator Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Provinsi Jawa Timur)	Variabel: Variabel Bebas: Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan dan laki-laki, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan laki-laki dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki Variabel Terikat: Pertumbuhan Ekonomi Jenis Data: <i>Time series:</i> 2009-2018 Metode Analisis: Model <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Hasil Penelitian: 1. AHH +S 2. RLS +S 3. TPAK –

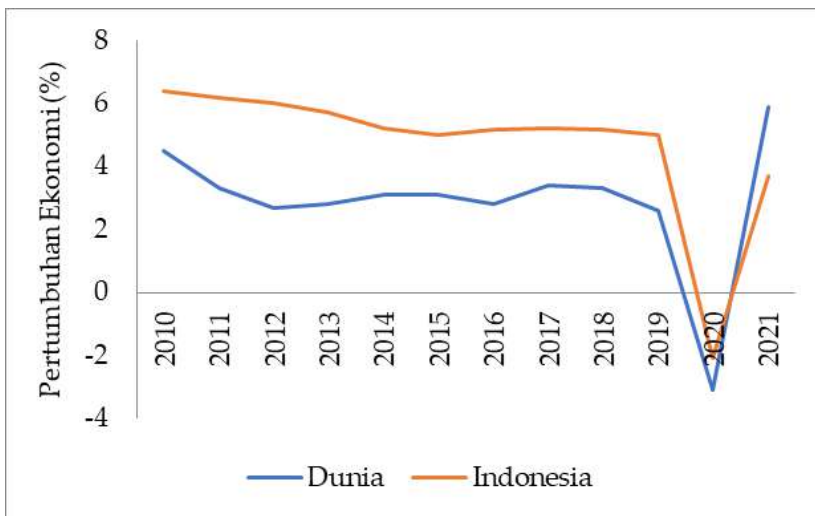
E. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sebelum dan Sesudah Covid-19

Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional. Pembangunan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan beberapa indikator, salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Harahap *et al.*, 2020). Pertumbuhan ekonomi

dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan pendapatan negara yang ditunjukkan oleh meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu (Amory, 2019).

Gambar 11 menggambarkan pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 12 tahun terakhir yang sebagian besar mengalami tren positif sebelum adanya pandemi Covid-19. World Bank (2023) dalam laporannya menyatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 sebesar 2,6 persen, pada tahun 2020 saat pandemi terjadi, pertumbuhan ekonomi dunia turun menjadi -3,1 persen, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dunia membaik lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatannya mencapai 5,9 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi akibat wabah Covid-19. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Saat terjadi pandemi di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis menjadi -2,07 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan membaik dan meningkat menjadi 3,70 persen. Pertumbuhan ekonomi harus disumbang oleh semua sektor ekonomi, adapun sektor yang stabil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun antara lain sektor konsumsi rumah tangga, konstruksi, transportasi dan perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini selalu berada di angka 5 persen atau lebih setiap tahunnya (Manggala, 2020). Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 juga menandakan mulai pulihnya perekonomian sesudah pandemi Covid-19 yang tentunya didukung oleh kemajuan ekonomi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia serta adanya program

pemerintah berupa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan dan mendukung pelaku usaha selama masa pandemi Covid-19, dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan memulihkan perekonomian Indonesia. Program PEN tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Abidin, 2021).



Gambar 11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: World Bank dan BPS Indonesia, 2010-2021 (diolah)

Data Tahun 2020 menjadi awal yang berat bagi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, World Health Organization (WHO) mengumumkan pada bulan Maret 2020, bahwa dunia sedang menghadapi wabah yang disebut *Corona Virus Infectious Disease 2019* atau Covid-19 (Li *et al.*, 2020). Menurut laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada akhir Desember 2022, terdapat 6,7 juta kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 6,5 juta orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan sebanyak 160 ribu orang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19. Menanggapi Covid-19 yang dianggap berbahaya karena banyaknya kasus dan tingginya angka kematian, WHO menyatakan bahwa Covid-19 secara resmi dinyatakan sebagai pandemi yang bersifat global. Selain itu, WHO juga menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 bukan hanya

sekedar masalah kesehatan, namun menjadi masalah serius dalam tatanan ekonomi, sosial, politik, dan psikologis (Putri, 2020). Pemerintah Indonesia merilis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *lockdown* pada awal bulan April 2020, kebijakan tersebut mengharuskan seluruh kegiatan di perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dan ruang publik ditutup (Sutrisno, 2020). Pemberlakuan kebijakan *lockdown* bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut menghambat aktivitas ekonomi dan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kondisi tersebut mengakibatkan perekonomian mengalami resesi (Aeni, 2021).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tabel 11 menunjukkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 174,81 juta. Sementara itu, wilayah dengan PDRB per kapita terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 12,76 juta. Rata-rata PDRB per kapita nasional adalah 43,64 juta dengan rasio PDRB per kapita tertinggi dan terendah sebesar 13,70 kali lipat.

Pada masa pandemi tahun 2020, hampir semua provinsi mengalami penurunan PDRB per kapita, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan PDRB per kapita tertinggi, yaitu senilai 170,09 juta. Sementara itu, daerah dengan PDRB per kapita terendah juga masih berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 12,96 juta. Rasio PDRB per kapita tertinggi dan terendah mencapai 13,12 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi sebesar 42,50 juta. Selama masa pandemi, wilayah dengan PDRB per kapita yang paling terdampak oleh pandemi berada di Provinsi Papua dengan rasio penurunan sebesar -20,13 persen. Sementara itu, daerah dengan peningkatan

PDRB per kapita terdampak pandemi paling kecil adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rasio peningkatan sebesar 7,13 persen.

Kemudian setelah program PEN dilaksanakan, terlihat bahwa PDRB per kapita mulai membaik dan mengalami peningkatan di hampir semua provinsi setiap tahunnya. Setelah pandemi, daerah dengan PDRB per kapita tertinggi masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 174,94 juta, sedangkan daerah dengan PDRB per kapita terendah juga masih diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 13,09 juta. Rata-rata PDRB per kapita nasional sebesar 43,56 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian, untuk perbandingan PDRB per kapita setelah pemulihan ekonomi, Provinsi Maluku Utara menjadi daerah dengan rasio kenaikan PDRB per kapita tertinggi, yakni mencapai 14,99 persen. Dengan demikian, Maluku Utara berhasil mencapai keberhasilan dalam pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan kebijakan utama, karena banyak ukuran masalah sosial dan kemiskinan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan salah satu syarat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,83 persen, sedangkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua sebesar -15,74 persen. Kemudian, rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi adalah sebesar 4,68 persen. Rasio pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah sebesar -0,56 kali lipat.

Pada masa pandemi, Provinsi Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,39 persen, sedangkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Bali sebesar -9,34 persen. Kemudian, rasio perbandingan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah mencapai -0,58 kali lipat dengan rata-rata -1,24 persen. Dengan demikian, Provinsi Bali menjadi daerah yang terdampak cukup parah akibat pandemi.

Setelah program PEN dilaksanakan, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat di beberapa daerah. Daerah

dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi masih ditempati oleh Provinsi Maluku Utara dengan nilai 16,79 persen. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah masih ditempati oleh Provinsi Bali dengan nilai -2,46 persen. Rasio antara pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah secara keseluruhan adalah sebesar -6,83 kali lipat. Kebijakan PEN yang diterapkan dapat dikatakan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi. Wilayah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi terbaik adalah Provinsi Papua dengan rasio sebesar 12,77 persen yang diikuti oleh beberapa provinsi lainnya.

Tabel 11. Perkembangan PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	PDRB per kapita (juta rupiah)					Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021	2019	2020	2021	Δ 2020	Δ 2021
AC	24,84	25,02	25,36	0,71	1,36	4,14	-0,37	2,79	-4,51	3,16
SU	36,85	36,18	36,67	-1,84	1,36	5,22	-1,07	2,61	-6,29	3,68
SB	31,43	30,70	31,36	-2,33	2,17	5,01	-1,61	3,29	-6,62	4,90
RI	72,51	76,88	78,00	6,03	1,44	2,81	-1,13	3,36	-3,94	4,49
JA	41,81	41,93	42,91	0,27	2,34	4,35	-0,51	3,69	-4,86	4,20
SS	37,13	37,32	38,17	0,53	2,28	5,69	-0,11	3,58	-5,80	3,69
BE	23,50	23,11	23,54	-1,70	1,88	4,94	-0,02	3,27	-4,96	3,29
LA	28,89	26,75	27,19	-7,43	1,67	5,26	-1,66	2,77	-6,92	4,43
BB	37,17	36,31	37,59	-2,33	3,52	3,32	-2,29	5,05	-5,61	7,34
KR	81,14	85,01	85,43	4,77	0,49	4,83	-3,80	3,43	-8,63	7,23
JK	174,81	170,09	174,94	-2,70	2,85	5,82	-2,39	3,56	-8,21	5,95
JB	30,41	30,18	30,91	-0,77	2,41	5,02	-2,52	3,74	-7,54	6,26
JT	28,70	26,48	27,14	-7,71	2,49	5,36	-2,65	3,33	-8,01	5,98
YO	27,01	27,75	28,92	2,76	4,20	6,59	-2,67	5,58	-9,26	8,25
JI	41,51	39,69	40,82	-4,40	2,86	5,53	-2,33	3,56	-7,86	5,89
BT	35,91	37,17	38,22	3,48	2,83	5,26	-3,39	4,49	-8,65	7,88
BA	37,30	34,22	32,98	-8,26	-3,63	5,60	-9,34	-2,46	-14,94	6,88
NB	18,22	17,58	17,71	-3,49	0,70	3,90	-0,62	2,30	-4,52	2,92
NT	12,76	12,96	13,09	1,56	1,02	5,25	-0,84	2,52	-6,09	3,36
KB	27,20	24,95	25,81	-8,26	3,44	5,09	-1,82	4,80	-6,91	6,62
KT	37,87	37,15	37,86	-1,91	1,91	6,12	-1,41	3,59	-7,53	5,00
KS	31,61	32,21	32,85	1,90	1,98	4,09	-1,82	3,48	-5,91	5,30
KI	134,41	125,76	127,21	-6,43	1,15	4,70	-2,90	2,55	-7,60	5,45
KU	88,30	86,82	88,51	-1,67	1,94	6,89	-1,09	3,98	-7,98	5,07

Provinsi	PDRB per kapita (juta rupiah)					Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021	2019	2020	2021	Δ 2020	Δ 2021
SA	35,69	33,67	34,79	-5,65	3,32	5,65	-0,99	4,16	-6,64	5,15
ST	42,05	45,05	49,59	7,13	10,07	8,83	4,86	11,70	-3,97	6,84
SN	37,47	36,25	37,57	-3,28	3,66	6,91	-0,71	4,64	-7,62	5,35
SG	35,31	35,71	36,58	1,13	2,44	6,50	-0,65	4,10	-7,15	4,75
GO	24,17	24,31	24,65	0,60	1,38	6,40	-0,02	2,41	-6,42	2,43
SR	24,16	22,67	22,90	-6,20	1,01	5,56	-2,34	2,57	-7,90	4,91
MA	17,56	16,69	17,02	-4,95	1,99	5,41	-0,91	3,05	-6,32	3,96
MU	21,52	21,92	25,20	1,81	14,99	6,25	5,39	16,79	-0,86	11,40
PB	64,42	54,49	52,98	-15,42	-2,77	2,66	-0,76	-0,51	-3,42	0,25
PA	40,20	32,11	36,43	-20,13	13,46	-15,74	2,39	15,16	18,13	12,77
Minimum	12,76	12,96	13,09	-20,13	-3,63	-15,74	-9,34	-2,46	-14,94	0,25
Maksimum	174,81	170,09	174,94	7,13	14,99	8,83	5,39	16,79	18,13	12,77
Rasio	13,70	13,12	13,36			-0,56	-0,58	-6,83		
Rata-rata	43,64	42,50	43,56			4,68	-1,24	4,20		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)

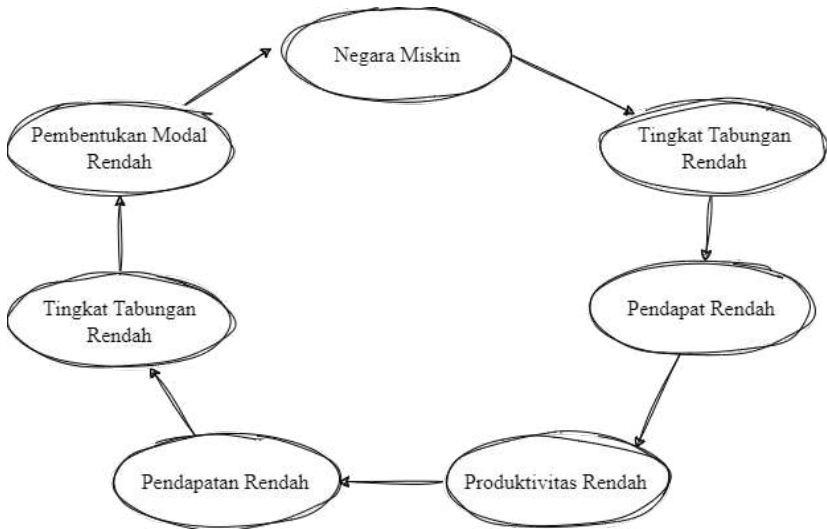


4

KEMISKINAN

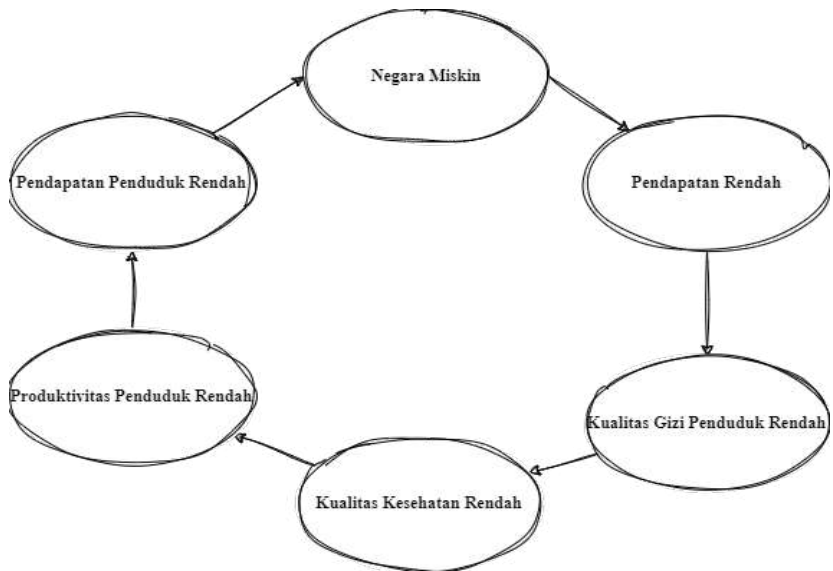
A. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Nurkse, mendalam tentang dinamika kompleks yang menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Menurut teori ini, hambatan pembentukan modal menjadi inti permasalahan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sudut pandang permintaan, masalah utama yang meracuni negara berkembang adalah hambatan dalam pembentukan modal. Sebaliknya, dari perspektif penawaran, penurunan standar hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi akar dari menurunnya produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Hal ini berdampak negatif pada kemampuan investor untuk melakukan investasi, menciptakan suatu spiral negatif. Dalam gambaran yang lebih jelas, standar hidup yang memburuk menghambat investasi, yang pada gilirannya menimbulkan kenaikan harga berbagai barang dan jasa. Teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan yang kompleks antara pembentukan modal, produktivitas ekonomi, dan standar hidup, membantu mengidentifikasi titik-titik intervensi yang strategis untuk menghentikan lingkaran setan kemiskinan (lihat Gambar 12).



Gambar 12. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Menurut Ragnar Nurkse
Sumber: Damanhuri (2010)

Teori lingkaran kemiskinan yang ditekankan oleh Myrdal menyoroti bahwa akar masalah kemiskinan dapat ditelusuri pada rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam kerangka ini, kemiskinan bermula dari tingkat pendapatan yang rendah, mengakibatkan rumah tangga kesulitan menyediakan nutrisi dan gizi yang memadai untuk anggota keluarga. Kondisi gizi yang rendah menjadi pemicu rendahnya tingkat kesehatan, suatu kondisi yang pada gilirannya akan menghambat peningkatan produktivitas. Menurunnya produktivitas berdampak pada efisiensi pekerjaan, menyebabkan penurunan pendapatan penduduk dan akhirnya menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputuskan, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 13 oleh Damanhuri (2010). Dengan memfokuskan pada aspek-aspek ini, teori Myrdal mengilustrasikan hubungan dinamis antara rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, produktivitas, dan kemiskinan, memberikan landasan untuk merancang strategi intervensi yang holistik dan berkelanjutan.



Gambar 13. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Menurut Myrdal
Sumber: Damanhuri (2010)

Berbagai upaya berikut ini menjelaskan penyebab utama kemiskinan menurut Sayifullah dan Gandasari (2016):

1. Menjadi miskin berarti memiliki pendapatan yang kecil. Daya beli terhadap ilmu pengetahuan dan informasi menjadi rendah karena pendapatan yang rendah. Orang miskin tidak memiliki pengetahuan yang cukup karena daya beli pengetahuan dan informasi yang rendah. Orang miskin tidak memiliki informasi yang cukup. Seseorang akan menjadi kurang produktif jika mereka kekurangan informasi. Karena rendahnya produksi, orang miskin akan jatuh miskin kembali.
2. Jika seseorang miskin, tentu saja ia hanya akan memiliki sedikit tabungan. Kepemilikan modal seseorang akan sangat minim karena kurangnya tabungan, yang akan menyebabkan rendahnya produksi dan sedikitnya pendapatan. Pendapatan yang rendah akan mendorong seseorang untuk jatuh ke dalam kemiskinan.
3. Menjadi miskin berarti seseorang akan selalu memiliki keterbatasan dalam hal konsumsi. Seseorang dengan kemampuan konsumsi yang rendah tidak akan mampu

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara memadai. Hal ini juga akan berdampak pada mereka yang tidak makan dengan baik. Seseorang dengan gizi yang tidak memadai tidak hanya akan memiliki produktivitas kerja yang rendah, tetapi juga *output* yang rendah, yang akan menyebabkan mereka jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Produktivitas kerja yang rendah akan menyebabkan seseorang jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah distribusi pembangunan yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, adalah akar dari kemiskinan. Menurut beberapa penelitian, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Faktor lainnya adalah kurangnya akses terhadap fasilitas dan layanan umum seperti transportasi, air minum, kesehatan, dan pendidikan. Daerah miskin tetap menjadi tempat terjadinya kasus kekurangan gizi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang tidak memadai. Bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, layanan bagi masyarakat yang rentan (seperti lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu), dan perlindungan jaminan sosial bagi rumah tangga berpenghasilan rendah masih belum memadai. Maksud dari lingkaran setan kemiskinan adalah dibutuhkannya semua pihak, terutama pemerintah, untuk mau memutus lingkaran tersebut. pemerintah untuk berani mengambil keputusan untuk menghentikan lingkaran setan kemiskinan yang ada. Lingkaran setan tidak akan pernah terputus jika salah satu dari bagiannya tidak dihilangkan.

B. Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai faktor, termasuk penyebab, cakupan, dan dampaknya. Berikut ini adalah beberapa jenis kemiskinan menurut Khomsan *et al.*, (2015):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Mutlak (Absolut), adalah Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hambatan untuk mengakses pekerjaan dan pendidikan. Kemiskinan absolut ditandai dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk hidup dan bekerja. *United Nation Research Institute for Social Development* menggolongkan kebutuhan dasar menjadi tiga kategori yaitu yang pertama kategori kebutuhan primer berupa makanan, tempat tinggal, dan kesehatan Kategori kedua terdiri dari kebutuhan sosial, yang mencakup hal-hal seperti pendidikan, liburan, dan jaminan ketenangan mental. Kategori ketiga adalah kelebihan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah suatu keadaan atau kondisi yang disebabkan oleh dampak dari kebijakan pembangunan yang tidak merata ke seluruh masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi. Karena sistem dan struktur sosial tidak mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk bekerja, maka terjadilah kemiskinan struktural. Struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, baik yang diberikan oleh alam, pemerintah, maupun lingkungan sekitar. Buruh tani, pemulung, penggali pasir, dan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan atau pelatihan kerja formal termasuk dalam kategori tersebut. Karena keterkaitan sosial ekonomi yang membuat beberapa kelompok individu tidak berada dalam situasi ekonomi yang lebih baik, maka kemiskinan pun terjadi. Adanya keterkaitan ekonomi dengan

negara-negara industri maju, serta terjadinya dominasi kekuasaan oleh segelintir orang, dan struktur sosial yang tidak mendukung kebebasan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan tersebut.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah sebuah pandangan hidup seseorang atau kelompok yang diakibatkan oleh pengaruh budaya. Pandangan budaya ini adalah pandangan di mana seseorang atau masyarakat merasa berkecukupan dan tidak kekurangan. Mereka miskin secara absolut, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak ingin dianggap miskin. Kemiskinan kultural, di sisi lain, mengacu pada kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap atau budaya yang dimiliki oleh orang miskin, seperti malas, cepat menyerah pada nasib, tidak memiliki etos kerja, dan sebagainya. Sikap apatis, kurang percaya, dan adanya prasangka buruk dari masyarakat luas merupakan ciri-ciri dari budaya kemiskinan ini, serta adanya ketidakinginan masyarakat untuk melibatkan diri mereka ke dalam lembaga-lembaga yang sudah ada. Sudut pandang lain mengenai budaya kemiskinan adalah efek lanjutan dari kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Masyarakat menjadi apatis, mudah putus asa, dan meyakini bahwa apa yang terjadi sudah menjadi takdirnya.

4. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah Penghasilan yang berada di atas garis kemiskinan tetapi masih jauh lebih rendah daripada penghasilan di tingkat lingkungan sekitar dikatakan berada dalam situasi kemiskinan. Perbandingan penghasilan antara kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok berpenghasilan tinggi menjadi dasar untuk mengukur kemiskinan relatif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kelompok tersebut miskin secara relatif dibandingkan dengan kelompok individu lain yang lebih tinggi pendapatannya, mereka sebenarnya tidak miskin secara absolut. Karena berkaitan dengan bagaimana pendapatan yang diterima secara

keseluruhan didistribusikan ke seluruh tingkat pendapatan masyarakat, maka kemiskinan dianggap relatif. Kemiskinan relatif paling tepat didefinisikan dari sudut pandang ketimpangan sosial, karena sebagian masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka namun tetap saja jauh lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya. Kemiskinan relatif secara langsung terkait dengan masalah distribusi pendapatan karena semakin tinggi perbedaan antara kelompok masyarakat yang tergolong atas dan bawah, maka semakin banyak orang yang masuk ke dalam kategori ini.

Menurut Ravallion (1998), garis kemiskinan relatif sering kali lebih rendah di negara-negara berkembang daripada di negara-negara maju. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perubahan pengertian tentang kemiskinan. Hal ini gilirannya dapat berdampak pada penilaian suatu negara terhadap garis kemiskinan. Di sisi lain, tingkat kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan kriteria yang didasarkan pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan melalui kebijakan pemerintah dengan berbagai upaya. Salah satu kebijakan utama adalah *new economic policy* (NEP). NEP bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih tergolong miskin dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perumahan, pekerjaan di sektor publik. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi. Pengukuran kemiskinan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan harga barang dan jasa di berbagai wilayah atau kelompok sosial (Ravallion, 2020).

C. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan, diantaranya, yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus siswa dan siswi yang putus sekolah, munculnya berbagai masalah pada kesehatan, meningkatnya kasus kriminalitas, jumlah angka kematian yang meningkat, banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat dan lain sebagainya. Kemiskinan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dikarenakan banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak mampu bersaing dengan masyarakat yang kaya.

Selanjutnya pada kasus kemiskinan menimbulkan banyak siswa dan siswi yang memilih untuk putus sekolah dikarenakan biaya pendidikan per anak masih tergolong cukup tinggi, sehingga menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada kasus kemiskinan menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan dikarenakan masyarakat yang tergolong miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi seperti empat sehat lima sempurna sehingga daya tahan tubuh mereka lemah dan gampang terkena berbagai penyakit. Selanjutnya kemiskinan menimbulkan angka kriminalitas tinggi dikarenakan masyarakat miskin cenderung kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, maka masyarakat miskin akan melakukan apa saja hingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dengan cara kriminalitas seperti merampok, mencuri, penipuan dan sebagai lainnya.

Selanjutnya kemiskinan menimbulkan angka kematian meningkat dikarenakan banyak masyarakat miskin yang kesulitan untuk dapat akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan keluarga sehingga menimbulkan angka kematian penduduk meningkat. Pada kasus kemiskinan menimbulkan terjadinya banyak konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kecemburuan sosial yang melibatkan masyarakat miskin dan masyarakat kaya, karena masyarakat yang miskin mendapatkan perlakuan yang berbeda dibanding dengan masyarakat yang kaya.

D. Cara Mengatasi Kemiskinan

Peran pemerintah dalam membantu melonjaknya angka kemiskinan terutama pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan menerapkan kebijakan PEN. Dengan adanya kebijakan PEN ini diharapkan banyak masyarakat yang terbantu dan membuat perekonomian membaik bahkan menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan PEN dapat tercapai karena pemerintah memberlakukan tiga kebijakan, antara lain yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, dan menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan sinergi antara pemegang kebijakan moneter, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak dalam ekonomi nasional yaitu dengan konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi dalam negeri maka ekonomi dapat bergerak. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggarannya untuk mendorong konsumsi atau daya beli masyarakat.

Dana tersebut disalurkan melalui kartu pra kerja, BLT (bantuan langsung tunai), pembebasan listrik, dan lain sebagainya. Untuk UMKM dan koperasi pemerintah juga ikut membantu melalui pemberian insentif atau stimulus. Dalam UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultra mikro, penundaan angsuran, penjaminan modal kerja sampai Rp 10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Untuk koperasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung PEN, Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, membeli obligasi pemerintah, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

E. Hubungan Gender dan Kemiskinan

Pembangunan manusia memegang potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Setiap individu diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti tanpa menghadapi diskriminasi yang dapat merugikan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Aspek gender dari kapasitas manusia menjadi pertimbangan krusial, di mana ketidaksetaraan gender, terutama yang merugikan perempuan dan membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan, menjadi hambatan serius. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memberikan mereka hak dan akses yang setara terhadap sumber daya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta pertumbuhan inklusif yang dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan di tingkat rumah tangga. Sebagai panduan utama, prinsip-prinsip ini ditemukan dalam laporan UNDP tahun 2016, menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melibatkan eliminasi ketidaksetaraan gender secara komprehensif.

Dormekpor (2015) yang meneliti tentang bagaimana hubungan kemiskinan dan ketimpangan gender di negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan dan ketimpangan gender dialami secara berbeda di banyak negara sedang berkembang dibandingkan dengan negara maju dan ada berbagai definisi yang diberikan dari beragam sudut pandang. Kemiskinan dan ketimpangan gender terus menjadi masalah yang besar di negara sedang berkembang, meskipun para pemerintah telah merancang kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dan memberantas masalah tersebut. Beberapa alasan menjelaskan penyebab posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan di negara sedang berkembang, antara lain; pertama, perempuan di negara berkembang memiliki akses yang sangat terbatas dalam aset domestik seperti hak atas tanah dan bangunan. Kedua, perempuan dalam negara sedang berkembang memiliki keterbatasan dalam pasar kredit, hal ini terkait diskriminasi gender dalam akses

kredit, yakni laki-laki atau suami cenderung lebih mudah dalam mendapatkan akses atau bantuan kredit daripada perempuan. Ketiga, pasar asuransi di negara sedang berkembang tidak berfungsi secara maksimal. Keempat, perempuan secara tipikal memiliki akses yang rendah dalam pasar kerja dan memiliki pendapatan yang lebih rendah pula dibanding laki-laki (Klasen *et al.*, 2015).

Banyak peneliti dan ekonom telah menggali hubungan antara gender dan kemiskinan, dan salah satu penelitian menarik datang dari Cheteni *et al.*, (2019), yang menyoroiti dampak signifikan gender terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Afrika Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan aset, akses ke layanan publik, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor ini dapat menjadi penentu apakah suatu wilayah berada dalam lingkungan miskin atau sebaliknya. Temuan penelitian ini memberikan panggilan untuk intervensi yang lebih efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan kemiskinan di daerah pedesaan di Afrika Tenggara.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Triani (2022) di Indonesia menunjukkan perspektif berbeda. Mereka berpendapat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tidak secara signifikan dipengaruhi oleh gender. Meskipun ketidaksetaraan gender meningkat, hal ini tidak langsung berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, penelitian ini menyoroiti bahwa ketidaksetaraan gender mungkin menjadi hambatan dalam keterlibatan perempuan dalam pembangunan, serta dapat mengurangi pengaruh mereka terhadap produksi dan efektivitas ekonomi. Dengan mempertimbangkan tingkat ketidaksetaraan gender yang bervariasi di setiap daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan, penelitian ini menegaskan bahwa dampak ketidaksetaraan gender terhadap kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada konteks spesifik. Oleh karena itu, dalam kasus Indonesia, tampaknya gender tidak memiliki dampak langsung

yang signifikan pada tingkat kemiskinan, namun tetap relevan dalam dinamika pembangunan ekonomi dan sosial.

Adnan dan Amri (2020) melakukan penelitian di kawasan barat Indonesia, provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Penelitian ini menggunakan metode *hierarchical linear panel regression* (HLPR). Hasil penelitiannya adalah pemberdayaan gender (IDG) berpengaruh positif terhadap pendapatan perempuan, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pendapatan perempuan secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Walid dan Pratama (2020) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitiannya adalah variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPG berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan variabel IDG berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan variabel tingkat tenaga kerja wanita profesional (TKWP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendapatan pekerja perempuan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Wulandari dan Ratnasari (2022) melakukan penelitian di 6 kabupaten dan 1 kota yakni, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta (Solo). Penelitian ini menggunakan metode analisis *random-effect*. Hasil dari penelitian ini adalah variabel sumbangan pendapatan perempuan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan laju pertumbuhan ekonomi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Aprilia dan Triani (2022) melakukan penelitian di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan *random effect model*. Hasil penelitiannya adalah variabel ketimpangan gender berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel rasio ketergantungan

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Auzar (2021) melakukan penelitian di 38 kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil penelitiannya adalah variabel IDG signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPM laki-laki signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPM perempuan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPG tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kusumastuti (2019) melakukan penelitian di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel usaha ekonomi produktif tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel kelompok simpan pinjam perempuan signifikan terhadap kemiskinan.

Direja dan Paramitasari (2022) melakukan penelitian di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner. Hasil penelitiannya adalah variabel rasio lama sekolah perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel rasio perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, variabel umur kepala rumah tangga (KRT) yang dikuadratkan memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, variabel lapangan usaha KRT memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, variabel jumlah anggota rumah tangga memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan.

Nisak dan Sugiharti (2020) melakukan penelitian pada 71.138 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitiannya adalah variabel status kesehatan reproduksi terbukti signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan, variabel

tingkat pendidikan terakhir perempuan terbukti signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan, variabel partisipasi kerja perempuan terbukti signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan.

Putri *et al.*, (2019) melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitiannya adalah variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, variabel status pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan, variabel jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Sari *et al.*, (2023) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear. Hasil penelitiannya adalah variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, angka putus sekolah, jumlah pengangguran, angka pengangguran, jarak ke pusat kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Abda dan Cahyono (2022) melakukan penelitian di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda penggunaan model regresi linear. Hasil penelitian ini adalah variabel IPM pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel sumbangan pendapatan perempuan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Tabel 12 memperlihatkan ringkasan hasil studi mengenai hubungan gender dengan kemiskinan.

Tabel 12. Ringkasan Studi Gender dan Kemiskinan

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
Adnan dan Amri (2020)	Pemberdayaan gender, pendapatan perempuan dan penurunan kemiskinan:	Variabel: Variabel Bebas: IDG, pendapatan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • IDG + • Pendapatan perempuan – S

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
	bukti data panel dari Kawasan Barat Indonesia	Variabel terikat: Tingkat kemiskinan. Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2010-2018 <i>Cross Section:</i> 8 provinsi di kawasan barat Indonesia. Provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan provinsi Lampung. Metode Analisis: Metode <i>hierarchical linier panel regression</i> (HLPR)	
Walid dan Pratama (2020)	<i>Analysis of gender inequality in poverty reduction program</i>	Variabel: Variabel Bebas: IPG, IDG, IPM, Tingkat Tenaga Kerja Wanita Profesional (TKWP), Pendapatan Pekerja Perempuan (SPP). Variabel Terikat:	<ul style="list-style-type: none"> • IPM – S • IPG + • IDG + • TKWP - • SPP -

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Tingkat Kemiskinan Jenis Data: <i>Time series:</i> 2015-2018 Metode Penelitian: <i>Metode ordinary least square (OLS)</i>	
Wulandari dan Ratnasari (2022)	Hubungan pendapatan perempuan dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Karesidenan Kartasura	Variabel: Variabel Bebas: Sumbangan pendapatan perempuan (IDG), laju pertumbuhan ekonomi. Variabel terikat: Kemiskinan (persentase) Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2017-2021 <i>Cross Section:</i> 6 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • IDG- S • Laju pertumbuhan ekonomi

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta (Solo). Metode Analisis: Teknik panel regresi dengan model analisis <i>random-effect</i>	
Aprilia dan Triani (2022)	Analisis pengaruh ketimpangan gender, rasio ketergantungan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia	Variabel: Variabel Bebas: Ketimpangan gender (IPG), rasio ketergantungan (angka beban ketergantungan), kesehatan (Umur Harapan Hidup Saat Lahir/UHH) Variabel terikat: Kemiskinan (persentase) Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2015-2019. <i>Cross Section:</i> 34 provinsi di Indonesia. Metode Analisis: Metode regresi data panel dengan <i>random effect model</i>	<ul style="list-style-type: none"> • IPG - • Rasio ketergantungan + • Kesehatan berpengaruh - S

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
Auzar (2021)	Kemiskinan, gender, dan covid-19 Jawa Timur	<p>Variabel: Variabel Bebas: IDG, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG Variabel terikat: Tingkat kemiskinan</p> <p>Jenis Data: <i>Cross Section:</i> 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. <i>Time series:</i> 2012-2020</p> <p>Metode Analisis: <i>Metode Ordinary Least Square (OLS)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • IDG S • IPM laki-laki S • IPM perempuan S • IPG
Kusumastuti (2019)	Peran perempuan dalam mengurangi kemiskinan	<p>Variabel: Variabel Bebas: Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Variabel terikat: Tingkat kemiskinan</p> <p>Jenis Data: <i>Cross Section:</i> Desa Srigading, Kecamatan Sanden,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UEP • SPP S

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Kabupaten Bantul menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu sebanyak 100 orang Metode Analisis: Model analisis regresi linier berganda	
Direja dan Paramitasari (2022)	Pengaruh ketidaksetaraan gender pada pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten	Variabel: Variabel Bebas: Rasio lama sekolah antara perempuan dan laki-laki, rasio perempuan dan laki-laki, umur KRT yang dikuadratkan, lapangan usaha KRT, jumlah anggota rumah tangga Variabel terikat: Kemiskinan (miskin= 1, tidak miskin= 0) Jenis Data: <i>Time series:</i> 2019-2020 Metode Analisis:	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio lama sekolah perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga - S • Rasio perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga + S • Umur KRT yang dikuadratkan + S • Lapangan usaha KRT + S • Jumlah anggota rumah tangga + S

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Metode regresi logistik biner	
Nisak dan Sugiharti (2020)	<i>Gender inequality and women poverty in Indonesia</i>	<p>Variabel: Variabel Bebas: Tingkat pendidikan (1 = rendah; 0 = tinggi), status kesehatan reproduksi (1 = tidak ditolong tenaga medis; 0 = ditolong tenaga medis), partisipasi kerja perempuan (1 = tidak bekerja, 0 = bekerja)</p> <p>Variabel terikat: Kemiskinan (1 = miskin; 0 = tidak miskin)</p> <p>Jenis Data: <i>Cross Section:</i> 71.138 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Status kesehatan reproduksi S • Tingkat pendidikan terakhir perempuan S • Partisipasi kerja perempuan S

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Metode Analisis: Metode regresi logistik	
Putri <i>et al.</i> , (2019)	Analisis kemiskinan berdasarkan gender di Provinsi Sumatera Barat	Variabel: Variabel Bebas: Pendidikan (lama sekolah), status pekerjaan (P=1 L=0), jumlah tanggungan (≥ 4 adalah 1, dan < 4 adalah 0) Variabel terikat: Kemiskinan (miskin= 1, tidak miskin= 0) Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2015-2017 Metode Analisis: Metode regresi logistik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan – S • Status pekerjaan + S • Jumlah tanggungan keluarga – S
Sari <i>et al.</i> , (2023)	Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu kajian berdasarkan faktor pendidikan, sosial, ekonomi, lokasi dan	Variabel: Variabel Bebas: Pendidikan (angka putus sekolah), lokasi (jarak tempat tinggal ke pusat kota), ekonomi (PDRB dan inflasi) dan IPM	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi – S • IPM - S • Pendidikan + S • Lokasi + S

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
	indeks pembangunan manusia	Variabel terikat: Tingkat kemiskinan Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2019-2020 Metode Analisis: Metode regresi linear	
Abda dan Cahyono (2022)	Apakah IPM, pengangguran, dan pendapatan perempuan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di kota Surabaya?	Variabel: Variabel Bebas: IPM, tingkat pengangguran terbuka, sumbangan pendapatan perempuan Variabel terikat: Tingkat kemiskinan Jenis Data: <i>Time Series:</i> 2010-2020 Metode Analisis: Metode analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • IPM - S • Tingkat pengangguran terbuka + S • Sumbangan pendapatan perempuan -

F. Kemiskinan di Indonesia

Negara Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini dijelaskan secara tegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Realisasi dari tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan mengurangi tingkat

kemiskinan di Indonesia, yang merupakan langkah krusial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya konkret dalam pengentasan kemiskinan (Pangiuk, 2018; Agusalm *et al.*, 2014).

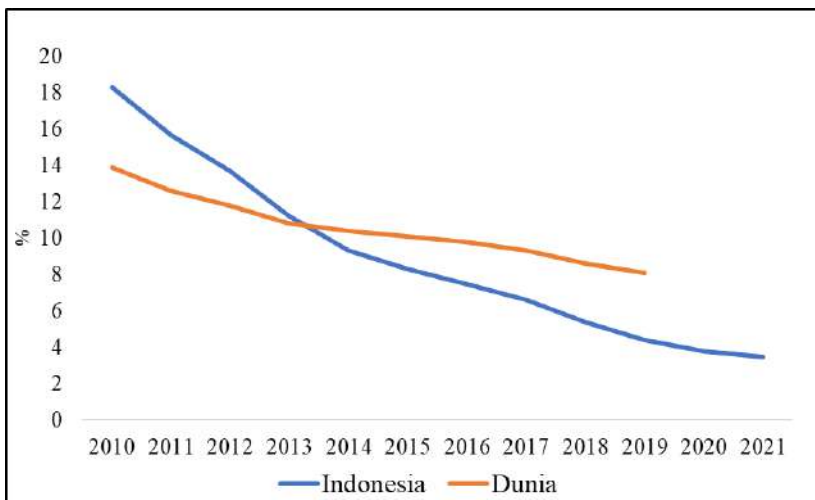
Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting, terutama dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan, beberapa di antaranya langsung berkaitan dengan kemiskinan. SDGs mewarisi semangat *Millennium Development Goals* (MDGs) yang memandang pemberantasan kemiskinan sebagai isu global utama yang perlu ditangani secara menyeluruh, dan Indonesia bukanlah pengecualian dalam menghadapi tantangan serius ini (Ishatono & Raharjo, 2016).

Pemerintah Indonesia merespons permasalahan kemiskinan ini dengan merancang kebijakan dan mengambil komitmen terkait SDGs melalui rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Langkah konkret juga diambil melalui penerapan Perpres Nomor 59 Tahun 2017, yang mengatur pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia (Arianto, 2019). Dengan dua inisiatif tersebut dan penetapan tujuan SDGs, terutama terkait kemiskinan dan kesetaraan gender, implementasinya dapat dilakukan di semua tingkatan pemerintahan.

Kesetaraan gender diwujudkan ketika laki-laki dan perempuan memiliki tujuan, kondisi, dan kapasitas yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan, seperti yang diungkapkan oleh Munasaroh (2022).

Pada bulan September 2022, World Bank melakukan pembaruan terhadap garis kemiskinan global dengan menetapkan ukuran paritas daya beli (PPP) baru pada tahun 2017, sebagaimana diinformasikan oleh Triono & Sangaji (2023). Gambar 14 tahun 2017 menunjukkan bahwa sebelumnya garis kemiskinan dunia adalah \$1,90 per hari. Namun, dengan pembaruan tersebut, garis kemiskinan naik menjadi \$2,15 per hari pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, sekitar 8,4 persen dari

jumlah penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan global dengan pendapatan sebesar \$2,15 per hari. Gambar 14 juga mencerminkan situasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010, dengan angka sebesar 18,3, dan menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Indonesia mencapai 3,5.



Gambar 14. Tingkat kemiskinan Indonesia dan Dunia dengan Pendapatan Kurang dari \$2,15 per Hari (2017 PPP) (% dari populasi)

Sumber: Worldbank - 2010-2021 (diolah)

Tabel 13 memperlihatkan pada tahun 2010 nilai tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar 36,80 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi Jakarta yaitu 3,48 persen. Pada tahun 2022 nilai tingkat kemiskinan tertinggi berada Provinsi Papua sebesar 26,80 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi Bali yaitu 4,3 persen. Rasio perbandingan nilai tingkat kemiskinan pada tahun 2010 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 10,57 kali lipat dengan rata-rata. Rasio perbandingan nilai tingkat kemiskinan pada tahun 2022 tertinggi dan terendah yaitu sebesar 5,92 kali lipat dengan rata-rata. Rata-rata tingkat kemiskinan pada tahun 2010 adalah 14,43 persen dan pada tahun 2022 yaitu 10,30 persen.

Tabel 13. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2022 di Indonesia

Provinsi	2010	2022	Δ TK
AC	20,98	14,75	-6,23
SU	11,31	8,33	-2,98
SB	9,50	6,04	-3,46
RI	8,65	6,84	-1,81
JA	8,34	7,70	-0,64
SS	15,47	11,95	-3,52
BE	18,30	14,34	-3,96
LA	18,94	11,44	-7,50
BB	6,51	4,61	-1,90
KR	8,05	6,03	-2,02
JK	3,48	4,61	1,13
JB	11,27	7,98	-3,29
JT	16,56	10,98	-5,58
YO	16,83	11,49	-5,34
JI	15,26	10,49	-4,77
BT	7,16	6,24	-0,92
BA	4,88	4,53	-0,35
NB	21,55	13,82	-7,73
NT	23,03	20,23	-2,80
KB	9,02	6,81	-2,21
KT	6,77	5,22	-1,55
KS	5,21	4,61	-0,60
KI	7,66	6,44	-1,22
KA	9,10	6,86	-2,24
SA	18,07	7,34	-10,73
ST	11,60	12,30	0,70
SN	17,05	8,66	-8,39
SG	23,19	11,27	-11,92
GO	13,58	15,51	1,93
SR	27,74	11,92	-15,82

Provinsi	2010	2022	Δ TK
MA	9,42	16,23	6,81
MU	34,88	6,37	-28,51
PB	36,80	21,43	-15,37
PA		26,80	
Minimum	3,48	4,53	-28,51
Maksimum	36,80	26,80	6,81
Rasio	10,57	5,92	-0,24
Rata-rata	14,43	10,30	-4,63

Catatan: TK pada tahun 2010-2012 tidak tersedianya data pada Provinsi Papua pada waktu itu.

Sumber: BPS Indonesia, 2010-2022 (diolah)



GENDER VS PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Model Empiris Efek Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Studi ini membahas tentang kondisi Covid-19 dan ketimpangan gender serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Periode studi dimulai dari tahun 2015-2021 di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh berupa angka, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka tersebut. Jenis data dalam penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur jurnal nasional dan internasional, buku serta literatur ilmiah lainnya. Kelengkapan data variabel yang digunakan dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Variabel Studi Efek Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Simbol	Definisi	Satuan
Variabel Dependen	<i>lnpdrb_k</i>	Pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita (log))	Juta Rupiah
Variabel Independen	<i>cov</i>	<i>Dummy</i> Covid-19	Sebelum Covid- 19=0, Setelah Covid- 19=1
	<i>lnikg</i>	Indeks ketimpangan gender (log)	0-1

Variabel	Simbol	Definisi	Satuan
	<i>lnipg</i>	Indeks pembangunan gender (log)	0-100
	<i>lnidg</i>	Indeks pemberdayaan gender (log)	0-100
Variabel Kontrol	<i>lnipm</i>	Indeks pembangunan manusia (log)	0-100
	<i>lnpmtb</i>	Pembentukan modal tetap bruto (log)	Juta Rupiah
	<i>rulp</i>	Rasio upah laki-laki terhadap perempuan	Persen

Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan pengolahan data menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*, dan STATA 16. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode analisis data panel merupakan metode yang digunakan untuk analisis empiris dengan data yang lebih dinamis. Data panel merupakan data yang menggambarkan gabungan data *cross-section* dan *time-series* atau biasa juga dikenal *pooled data*. Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengadaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2021) dengan menambahkan beberapa variabel yang secara umum memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan umumnya digunakan dalam persamaan pertumbuhan serta tambahan variabel *dummy* Covid-19. Berikut merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini.

$$\begin{aligned}
 \ln pdrb_{kit} = & \beta_0 + \beta_1 cov_{it} + \beta_2 lnikg_{it} + \beta_3 cov_{it} * lnikg_{it} \\
 & + \beta_4 lnipg_{it} + \beta_5 cov_{it} * lnipg_{it} + \beta_6 lnidg_{it} \\
 & + \beta_7 cov_{it} * lnidg_{it} + \theta lnvk_{it} + \varepsilon_{it} \dots [1]
 \end{aligned}$$

Model ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19.

Sebelum Covid-19 ($cov = 0$)

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{kit} = & \beta_0 + \beta_1 cov_{it}(0) + \beta_2 \ln nikg_{it} + \beta_3 cov_{it}(0) \\ & * \ln nikg_{it} + \beta_4 \ln nipg_{it} + \beta_5 cov_{it}(0) * \ln nipg_{it} \\ & + \beta_6 \ln idg_{it} + \beta_7 cov_{it}(0) * \ln idg_{it} + \theta vk_{it} \\ & + \varepsilon_{it} \dots [2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{kit} = & \beta_0 + \beta_2 \ln nikg_{it} + \beta_4 \ln nipg_{it} + \beta_6 \ln idg_{it} + \theta \ln vk_{it} \\ & + \varepsilon_{it} \dots [3] \end{aligned}$$

Sesudah Covid-19 ($cov = 1$)

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{kit} = & \beta_0 + \beta_1 cov_{it}(1) + \beta_2 \ln nikg_{it} + \beta_3 cov_{it}(1) \\ & * \ln nikg_{it} + \beta_4 \ln nipg_{it} + \beta_5 cov_{it}(1) * \ln nipg_{it} \\ & + \beta_6 \ln idg_{it} + \beta_7 cov_{it}(1) * \ln idg_{it} + \theta vk_{it} \\ & + \varepsilon_{it} \dots [4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{kit} = & (\beta_0 + \beta_1) + (\beta_2 + \beta_3) \ln nikg_{it} + (\beta_4 + \beta_5) \ln nipg_{it} \\ & + (\beta_6 + \beta_7) \ln idg_{it} + \theta \ln vk_{it} + \varepsilon_{it} \dots [5] \end{aligned}$$

Signifikansi β_1 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Signifikansi β_3 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pengaruh indeks ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Signifikansi β_5 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pengaruh indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Signifikansi β_7 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pengaruh indeks pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

B. Efek Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga uji yang perlu dilakukan untuk mengetahui dan menentukan teknik pemilihan pendekatan model yang terbaik yang akan digunakan dalam penelitian. Ketiga uji tersebut adalah uji Chow yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM atau FEM. Ketika hasil probabilitas dari uji Chow lebih kecil dari taraf nyata, maka

keputusan yang diambil adalah menggunakan model FEM. Selanjutnya, uji Hausman yang digunakan untuk memilih model FEM atau REM dilihat dari nilai *Chi-square*. Jika probabilitas kurang dari taraf nyata, maka model yang digunakan adalah FEM, dan sebaliknya jika probabilitas lebih dari taraf nyata, maka model yang akan dipilih adalah REM. Terakhir, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara REM dan CEM. Jika hasil perhitungan LM lebih besar dari *Chi-square* tabel, maka model yang digunakan adalah CEM, dan sebaliknya (Agusalim *et al.*, 2022).

Hasil analisis model penelitian yang terpilih menggunakan regresi data panel dengan teknik FEM. Berdasarkan Tabel 15, terlihat bahwa interpretasi untuk *R-squared* atau koefisien determinasi model penelitian sebesar 0,693 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang terpilih secara bersama-sama mampu menjelaskan keragaman pertumbuhan ekonomi sebesar 69,3 persen dan sisanya sebesar 30,7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Kemudian hasil dari *F-statistic* adalah sebesar 374,11 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 15. Hasil Analisis Efek Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (<i>lnpdrb_k</i>)
<i>cov</i>	-7,798*** (1,009)
<i>lnikg</i>	-0,052* (0,029)
<i>cov * lnikg</i>	0,038* (0,021)
<i>lnipg</i>	-0,677 (1,142)
<i>cov * lnipg</i>	1,598*** (0,217)
<i>lnidg</i>	-0,079 (0,064)
<i>cov * lnidg</i>	0,108 (0,072)

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (<i>lnpdrb_k</i>)
Variabel Kontrol	
<i>lnipm</i>	2,037*** (0,389)
<i>lnpmtb</i>	0,263*** (0,039)
<i>rulp</i>	0,035 (0,043)
Konstanta	-2,592 (4,808)
<i>R-squared</i>	0,693
<i>F-statistic</i>	374,11
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,0000
Jumlah observasi	238
Jumlah provinsi	34
Kriteria Pemilihan Model	
Uji Chow	0,0000
Uji Hausman	0,0014
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	0,0000
Keputusan	FEM

Catatan: Dalam kurung adalah standar error; signifikansi taraf nyata *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Sumber: Hasil kalkulasi penulis (2023)

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor dilakukannya penelitian ini. Peneliti mencoba untuk menganalisis beberapa variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dapat dilihat pada Tabel 16 yang menunjukkan hasil estimasi periode sebelum dan sesudah pandemi, terdapat lima variabel yang signifikan pada kategori sebelum dan sesudah pandemi. Variabel yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain variabel Covid-19, IKG, IPG, dan variabel kontrol lainnya seperti IPM dan PMTB. Sementara itu, variabel IDG dan RULP tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik sebelum maupun sesudah pandemi.

Tabel 16. Hasil Estimasi Periode Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (<i>lnpdrb_k</i>)	
	Sebelum Covid-19	Sesudah Covid-19
	(<i>cov</i> = 0)	(<i>cov</i> = 1)
<i>cov</i>	-	-7,798
<i>lnikg</i>	-0,052	-0,014
<i>lnipg</i>	-	1,598
<i>lnidg</i>	-	-
Variabel Kontrol		
<i>lnipm</i>	-	2,037
<i>lnpmtb</i>	-	0,263
<i>rulp</i>	-	-

Sumber: Hasil kalkulasi penulis (2023)

1. Pengaruh Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis regresi data panel, Covid-19 tercatat sebagai variabel yang paling memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, hasil uji regresi variabel *dummy* Covid-19 memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar -7,80. Angka ini berarti bahwa ketika terjadi pandemi, pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 7,80 persen dari kondisi awal sebelum pandemi.

Hasil estimasi sejalan dengan penelitian Iriyadi dan Purba (2022) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi masyarakat, investasi, ekspor dan impor. Faktor relaksasi berpengaruh positif terhadap konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, namun belum berhasil menciptakan pertumbuhan investasi yang positif.

Kebijakan pemerintah berusaha untuk memperkuat daya beli masyarakat, serta sektor produksi. Hal ini berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat dan menjadi faktor dominan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan pendapatan per kapita.

Pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh negara di dunia, banyak negara yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sejak munculnya pandemi, termasuk Indonesia. Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional adalah dengan meluncurkan program PEN yang dirancang untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dunia usaha dalam menjalankan usahanya di masa pandemi Covid-19. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tidak semakin terpuruk. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat bertahan dari dampak buruk pandemi Covid-19. APBN 2021 merupakan instrumen dalam PEN dan tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Tujuan tersebut adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, dan konsolidasi fiskal. Langkah-langkah dan strategi percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dalam APBN 2021 difokuskan pada aspek kesehatan, ekonomi, dan reformasi. Aspek kesehatan diarahkan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat melalui penyediaan vaksin untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Aspek ekonomi diarahkan untuk memberikan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif melalui dukungan terhadap program atau kegiatan di sektor-sektor terdampak, perluasan akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR, dan melanjutkan program perlindungan sosial yang

dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Sementara itu, aspek reformasi diarahkan untuk memperkuat reformasi struktural untuk membangun fondasi yang kuat bagi pemulihan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Kebijakan ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak semakin menurun (Lativa, 2021).

2. Pengaruh Indeks Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebelum pandemi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa IKG menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum pandemi. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar $-0,05$. Angka ini berarti bahwa ketika IKG meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,05$ persen. Selanjutnya, terdapat hasil uji regresi untuk variabel interaksi antara Covid-19 dengan variabel IKG yang juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa IKG menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesudah pandemi. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar $-0,01$. Angka ini berarti bahwa ketika IKG meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,01$ persen. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, tetapi arah hubungannya tetap sama.

Hasil regresi yang dilakukan sebelum dan sesudah pandemi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.* (2021) yang mengungkapkan bahwa ketimpangan gender berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan ketimpangan gender akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Handayani (2023) menjelaskan bahwa kondisi ketimpangan gender yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia disebabkan oleh kontribusi dari dimensi kesehatan, terutama angka kematian ibu yang masih tinggi. Dari dimensi ekonomi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga lebih kecil dibandingkan laki-laki, serta partisipasi perempuan di bidang politik juga relatif rendah. Permasalahan kesetaraan gender lainnya di tingkat nasional adalah disparitas pencapaian indeks kesetaraan gender antar provinsi. Mengingat persoalan mendasar kesenjangan gender berasal dari akar budaya, maka strategi yang harus dilakukan adalah melalui internalisasi nilai-nilai kesetaraan, tidak hanya di tingkat negara, birokrasi, tetapi juga di tingkat lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara lebih proaktif.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa IPG tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan atau kenaikan sebelum pandemi.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Lusiarista dan Arif (2022) yang menunjukkan bahwa naik turunnya IPG tidak menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan di mana dalam budaya tersebut perempuan lebih diarahkan untuk menjalankan peran di domestik daripada peran publik yang mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan sering terjadi sehingga akses dan perannya di berbagai sektor menjadi terhambat, termasuk di sektor ekonomi. Pemerintah dapat memfasilitasi perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan partisipasi

perempuan dalam angkatan kerja, sehingga akan mengurangi ketimpangan gender.

Selanjutnya, terdapat hasil uji regresi untuk variabel interaksi antara Covid-19 dengan variabel IPG yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa IPG menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar 1,60. Angka tersebut dapat diinterpretasikan, ketika IPG meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,60 persen. Hasil tersebut memiliki perbedaan pengaruh IPG terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2021), Nursini dan Syahrul (2022), dan Sitorus (2016) yang sebelumnya telah membuktikan bahwa IPG berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pembangunan gender di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan meningkatkan kemampuan dasar termasuk kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak pada laki-laki, tetapi juga penduduk perempuan. Semakin rendah ketimpangan gender dalam IPG, maka semakin maju pula kinerja ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saat pandemi terjadi, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan, berbagai bentuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kesetaraan gender cenderung dilakukan secara virtual. Khusus untuk perempuan pelaku usaha yang terdampak pandemi, KemenPPPA terus melakukan sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi perempuan dari kelompok rentan. Dengan melakukan pelatihan kewirausahaan secara daring bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan *start*

up sebagai bekal agar mereka dapat beradaptasi menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan siap bersaing dalam situasi sulit di masa pandemi. Sesuai dengan arahan Presiden, di masa pandemi, prioritas diberikan pada peningkatan pemberdayaan perempuan di sektor usaha yang berperspektif gender, tidak untuk semua perempuan, tetapi secara khusus untuk perempuan yang termasuk dalam kategori rentan, seperti kepala keluarga, penyintas bencana, penyintas kekerasan, dan perempuan yang terpinggirkan. Dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi perempuan di masa pandemi, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan perekonomian negara (Kansil *et al.*, 2021).

4. Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan variabel interaksi antara Covid-19 dengan variabel IDG tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa IDG tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan baik sebelum maupun sesudah pandemi.

Dalam penelitian ini, variabel IDG tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Selain itu, belum optimalnya peran perempuan di bidang politik dan ekonomi disebabkan karena bidang-bidang tersebut masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi ini menyebabkan perempuan kurang memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dan tingkat produktivitasnya pun terbatas sehingga tidak optimal dalam memengaruhi perekonomian.

Bertolak belakang dengan penelitian Infarizki *et al.* (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya IDG berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jumlah profesional perempuan dan partisipasi perempuan dapat disetarakan dengan laki-laki. Hal ini berarti tidak ada dominasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga peran pemberdayaan perempuan dapat memengaruhi perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sesudah pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat di Indonesia. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar 2,04. Angka tersebut dapat diartikan, ketika IPM meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,04 persen.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agusalim *et al.*, (2022), Sari (2021), Nazmi dan Jamal (2018), dan Sitorus (2016). Beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel IPM dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan manusia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi modern karena pembangunan manusia yang baik akan membuat faktor-faktor produksi dapat dimaksimalkan. Penduduk yang berkualitas akan mampu berinovasi untuk mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Semakin cepat pembangunan manusia dengan pemerataan pendidikan dan kesehatan, maka pertumbuhan ekonomi akan mencapai peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja.

6. Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa PMTB menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar 0,26. Angka tersebut dapat diartikan, ketika PMTB meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26 persen. Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian Fauziah dan Juliprijanto (2022) dan Kesuma dan Astuti (2020). Pada beberapa penelitian tersebut dijelaskan bahwa PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada sektor infrastruktur terhadap perekonomian di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pertumbuhan inklusif merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti yang tertuang dalam kesepakatan global tentang SDGs, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pemerataan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jaminan keberlanjutan pembangunan infrastruktur adalah tersedianya modal pembangunan yang cukup. Modal pembangunan infrastruktur dapat disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Investasi oleh pemerintah pusat ke daerah dilakukan melalui Alokasi Dana Khusus (DAK), sedangkan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (Panjaitan *et al.*, 2019). Kemudian PMTB juga memiliki respon yang cepat ketika terjadi guncangan ekonomi, terutama pada masa

pandemi. Dalam hal ini, pengadaan, pembuatan, pembelian atau perbaikan barang modal akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah dari suatu proses produksi yang sedang berjalan. Peningkatan kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu memang diharapkan. Hal ini dikarenakan peningkatan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dalam jangka panjang akan mengurangi pengangguran dan ketimpangan ekonomi (Siregar dan Rizky, 2022).

7. Pengaruh Rasio Perbandingan Upah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel rasio perbandingan upah laki-laki terhadap Perempuan (RULP) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa RULP tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan baik sebelum maupun sesudah pandemi.

Variabel RULP merupakan bentuk rasio upah berdasarkan jenis kelamin dan upah berdasarkan upah minimum provinsi. Perbedaan upah antar gender merupakan salah satu masalah dalam perekonomian, banyak faktor yang memengaruhi kesenjangan upah antar gender, salah satunya karena modal kerja. Menurut Laili dan Damayanti (2018), adanya ekspektasi yang rendah terhadap perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu penyebabnya, memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga membuat modal manusia perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian mereka juga membuktikan adanya diskriminasi upah antar gender akibat peningkatan produktivitas pekerja perempuan namun tidak diimbangi dengan peningkatan upah. Pada kenyataannya, meskipun selalu terjadi peningkatan upah buruh dari tahun ke tahun, namun upah yang diterima perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki. Padahal sudah

ada kebijakan anti diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100. Dilansir dalam World Economic Forum pada tahun 2018, tercatat rata-rata pekerja perempuan di dunia masih dibayar 63 persen dari upah laki-laki (Sari, 2021). Selain itu, ketika perempuan mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan perempuan. Hal ini berlaku jika seorang perempuan adalah seorang ibu tunggal yang menghidupi keluarganya. Dengan upah yang setara, keluarga akan merasa lebih aman secara ekonomi. Kesetaraan upah merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah negara karena dengan kemampuan finansial yang baik, perempuan sebagai ibu akan lebih mampu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, yang di masa depan akan berpengaruh pada modal manusia (*human capital*). Peningkatan modal manusia generasi berikutnya inilah yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Ruiters dan Charteris, 2020).

C. Kebijakan Pembangunan Gender dalam Pengurangan Kemiskinan

Ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan gender yang tinggi menjadi penghambat tercapainya pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tentunya menyebabkan kesejahteraan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Secara regulasi, pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia terkait gender sudah ada sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Kemudian pada masa Orde Baru, dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selanjutnya pada era reformasi,

Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya INPRES tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Hingga saat ini, kebijakan serupa terkait kesetaraan gender masih terus dilakukan, yaitu dengan adanya komitmen global untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (Ridhwani dan Lestari, 2023).

Terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada perempuan yang tinggal di perkotaan, namun kini peran perempuan yang tinggal di pedesaan juga turut andil dalam menentukan arah pembangunan desanya. Dengan adanya UU Desa, diharapkan dapat menjadi salah satu perwujudan hak-hak masyarakat desa dalam memajukan desanya dengan mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan desa. Sehingga kesetaraan gender bagi perempuan di desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa (Rahmawati, 2020).

Selain itu, dalam proses pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 merupakan komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB untuk turut serta mewujudkan SDGs yang tertuang dalam “Transforming Our World: Agenda 2030” untuk pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs yang dijabarkan dalam Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai tujuan global dan selaras dengan pembangunan nasional Indonesia, adalah jaminan kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang akan mencegah perlakuan diskriminatif. Kesetaraan gender juga dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, memerangi kelaparan, kemiskinan, penanggulangan HIV/AIDS, yang akan diwujudkan dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perwujudan kesetaraan dan pemberdayaan gender merupakan wujud komitmen pemerintah bersama negara-negara anggota PBB untuk mencapai SDGs yang dimulai pada tahun 2017 (Prasetyawati, 2018).

Tujuan SDGs yang terkait dengan kesetaraan gender sejalan dengan tujuan KemenPPPA, yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. KemenPPPA memiliki beberapa kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut yang tertuang dalam Peraturan KemenPPPA Nomor 2 Tahun 2020. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh KemenPPPA antara lain peningkatan peran dan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, KemenPPPA berkomitmen untuk memperkuat jejaring dan koordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, KemenPPPA juga berfokus pada perbaikan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data berbasis gender untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.



GENDER VS KEMISKINAN

A. Model Empiris Efek Gender terhadap Kemiskinan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri atas data tingkat kemiskinan, IPG, IDG, rasio upah laki-laki terhadap perempuan, pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal tetap bruto, dan tingkat pengangguran terbuka yang bersumber dari BPS. Riset ini dilakukan selama periode tahun 2010 hingga 2022 di 34 provinsi di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini, akan menganalisis peran gender di setiap Provinsi di Indonesia. IPG dan IDG digunakan untuk mengukur peran gender di Indonesia. Metode analisis data panel merupakan metode yang digunakan untuk analisis empiris dengan data yang lebih dinamis. Data panel adalah hasil observasi terhadap kumpulan dari data *cross-section* dan *time-series*. Menurut Widarjono (2017), data panel memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu, data panel menggabungkan informasi dari data *time-series* dan *cross-section* untuk mengatasi masalah yang muncul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Berikut spesifikasi model empiris pada penelitian ini yang ini dimodifikasi dari Putri dan Fakhrudin (2016) dan Auzar (2021):

- **Model 1**

$$tk = a + a_1ipg_{it} + a_2rulp_{it} + a_3lpdrbk_{it} + a_4lpmtb_{it} + a_5tpt_{it} + \varepsilon_{it} \dots [6]$$

- **Model 2**

$$tk = \beta + \beta_1 idg_{it} + \beta_2 rulp_{it} + \beta_3 lpdrbk_{it} + \beta_4 lpmtb_{it} + \beta_5 tpt_{it} + \varepsilon_{it} \dots [7]$$

➤ **Model 3**

$$tk = \theta + \theta_1 ipg_{it} + \theta_2 idg_{it} + \theta_3 rulp_{it} + \theta_4 lpdrbk_{it} + \theta_5 lpmtb_{it} + \theta_6 tpt_{it} + \varepsilon_{it} \dots [8]$$

Dimana tk adalah tingkat kemiskinan, ipg adalah indeks Pembangunan gender, idg adalah indeks pemberdayaan gender, $rulp$ adalah rasio upah laki-laki terhadap Perempuan, $lpdrbk$ adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita yang di ubah ke dalam bentuk logaritma natural), $lpmtb$ adalah pertumbuhan investasi (penetapan modal tetap bruto per kapita yang di ubah ke dalam bentuk logaritma natural), dan tpt adalah tingkat pengangguran terbuka. α , β , dan θ adalah parameter estimasi. ε adalah *error term*, i adalah data *cross-section* 34 provinsi, dan t adalah data *time-series* tahun 2010-2022.

B. Efek Gender terhadap Kemiskinan

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pengujian penting untuk menentukan teknik pemilihan model yang terbaik dalam penelitian. Pertama, uji Chow digunakan untuk memilih antara teknik pemilihan model *Common Effects Model* (CEM) atau *Fixed Effects Model* (FEM). Keputusan diambil berdasarkan probabilitas uji Chow; jika lebih kecil dari taraf nyata, model FEM dipilih, sedangkan jika lebih besar, model CEM yang digunakan. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah memilih model FEM atau *Random Effects Model* (REM) lebih tepat. Jika probabilitas uji Hausman lebih kecil dari taraf nyata, maka model yang dipilih adalah FEM; sebaliknya, jika lebih besar, model yang dipilih adalah REM. Terakhir, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara REM dan CEM. Jika hasil probabilitas LM lebih besar dari nilai *Chi-square*, maka model yang digunakan adalah REM. Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari nilai *Chi-square*, maka model yang dipilih adalah CEM.

Dengan melakukan ketiga pengujian ini, penelitian dapat memastikan pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai dengan karakteristik data yang dimiliki, sehingga hasil analisis lebih akurat dan relevan. Setelah melakukan beberapa pengujian untuk memilih metode analisis data panel yang paling baik untuk digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel, maka dipilih untuk model pertama menggunakan FEM. Pada model kedua dan model ketiga menggunakan REM.

Dapat dilihat pada Tabel 17 bahwa hasil interpretasi untuk *R-squared* atau koefisien determinasi semua model mulai penelitian dari 0,12 persen sampai dengan 0,37 persen. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel independen penelitian pada masing-masing simultan dapat menjelaskan variabel dependen dari yang terkecil 0,12 persen sampai 0,37 persen. Karena dari ketiga model tersebut mendapatkan nilai *R-squared* di bawah 0,5, maka kemungkinan ada faktor lain dari error yang lebih besar yang dapat menjelaskan dan mempengaruhi di luar model regresi. Hasil *F-statistik* pada model pertama menunjukkan hasil kurang dari 0,5. Artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pada hasil *Wald Chi2* pada model kedua dan ketiga menunjukkan lebih dari 0,5. Artinya variabel independen pada model pertama dan model ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Tabel 17. Hasil Analisis Efek Gender terhadap Kemiskinan

Variabel independen	Variabel dependen: Tingkat kemiskinan		
	Model 1	Model 2	Model 3
<i>ipg</i>	-0.966*** (0.143)		-0.984*** (0.149)
<i>idg</i>		-0.0346 (0.0296)	0.0117 (0.0293)
Variabel kontrol			
<i>rulp</i>	-2.220 (1.957)	-1.971 (2.046)	-2.242 (1.960)

Variabel independen	Variabel dependen: Tingkat kemiskinan		
	Model 1	Model 2	Model 3
<i>lpdrbk</i>	-3.474*** (0.951)	-5.676*** (0.977)	-3.451*** (0.960)
<i>lpmtb</i>	-0.00718 (0.378)	-0.648* (0.382)	-0.00252 (0.378)
<i>tpt</i>	0.130 (0.131)	0.186 (0.138)	0.134 (0.132)
Konstanta	112.5*** (12.05)	37.86*** (4.500)	113.2*** (12.21)
<i>R-square</i>	0.2145	0.1220	0.3732
<i>F-statistik</i>	20.25		
<i>Wald Chi²</i>		66.78	116.35
Observasi	433	433	433
Provinsi	34	34	34
Kriteria pemilihan model			
Uji Chow	0.0000	0.0000	0.0000
Uji Hausman	0.0000	0.0828	0.3082
Uji <i>Lagrange multiplier</i>	0.0000	0.0000	0.0000
Keputusan	FEM	REM	REM

Catatan: Dalam kurung adalah standard error, signifikan taraf nyata *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Hasil Kalkulasi Penulis Menggunakan Stata 17 (2023)

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, tampak bahwa variabel pembangunan gender memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik pada model satu maupun model tiga. Dari hasil regresi pada Tabel 17, dapat dilihat bahwa nilai koefisien

regresi variabel pembangunan gender pada model pertama adalah $-0,96$, dan pada model ketiga adalah $-0,98$. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sekitar $0,96$ hingga $0,98$. Peningkatan pembangunan gender di sini merujuk pada semakin setara capaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan ini tidak hanya melibatkan penduduk laki-laki, tetapi juga penduduk perempuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Temuan ini mendukung hipotesis awal bahwa pembangunan gender berkontribusi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan Putri dan Fakhruddin (2016) di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa pembangunan gender memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap garis kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa setiap kenaikan nilai pembangunan gender dapat meningkatkan garis kemiskinan.

2. Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan gender tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam model dua maupun model tiga. Dilihat dari Tabel 17, nilai koefisien regresi untuk variabel pemberdayaan gender tidak menunjukkan signifikansi statistik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu alasan mungkin adalah keterbatasan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kertati (2021) yang menyatakan bahwa meskipun tingkat pemberdayaan gender di Kota Surakarta mencapai rata-rata tingkat Jawa Barat, masih terdapat beberapa indikator pemberdayaan gender yang tertinggal, seperti partisipasi

perempuan dalam politik dan kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga. Penurunan pada beberapa indikator tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan yang belum optimal dan dominasi unsur domestikasi yang masih kuat.

3. Pengaruh Rasio Perbandingan Upah terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel rasio perbandingan upah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam model pertama hingga model ketiga. Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio perbandingan upah tidak menunjukkan pengaruh penurunan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel rasio perbandingan upah mencerminkan rasio variasi upah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan minimum provinsi. Ketika rasio ini semakin besar, artinya ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan semakin besar. Kesenjangan upah berdasarkan gender menjadi salah satu masalah dalam perekonomian, terutama jika lebih banyak pekerja laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini dapat meningkatkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, dipengaruhi oleh keseimbangan antara mengurus rumah tangga dan beraktivitas bekerja, faktor penting dalam menentukan upah. Analisis ketidaksetaraan gender dalam ekonomi menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga sering kali harus memilih antara mengurus keluarga atau bekerja (KemenPPPA, 2016).

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi pada model pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel

pertumbuhan ekonomi adalah -3,47, -5,67, dan -3,45, secara berturut-turut.

Nilai koefisien tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar -3,47 hingga -5,67. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingginya produktivitas penduduk di suatu wilayah, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil studi ini konsisten dengan temuan Christiani dan Nainupu (2021) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pengaruh Pertumbuhan Investasi terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan investasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi pada model pertama hingga model ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan investasi tidak signifikan.

Pertumbuhan investasi dianggap sebagai faktor yang dapat meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja, yang pada teorinya dapat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan investasi dan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks ini, penelitian Kusumaningrum dan Yuhan (2019) memberikan perspektif bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat mempermudah distribusi barang ke daerah-daerah terpencil dan mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa hasil

penelitian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual dan dinamika ekonomi yang kompleks.

6. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran (TPT) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi pada model pertama hingga model ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat pengangguran tidak signifikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penjelasan yang diberikan adalah bahwa meskipun ada anggota rumah tangga yang menganggur, adanya anggota keluarga lain yang bekerja dengan upah tinggi dapat membantu menanggung biaya hidup anggota yang menganggur. Dengan kata lain, keberadaan anggota keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup dapat mencegah keluarga tersebut agar tidak hidup dalam garis kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Giovanni (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia. Variabel ini mungkin tidak menjadi faktor penentu tunggal dalam menjelaskan tingkat kemiskinan, dan faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan keluarga secara keseluruhan atau distribusi pendapatan juga perlu diperhitungkan.

C. Kebijakan Pembangunan Gender dalam Pengurangan Kemiskinan

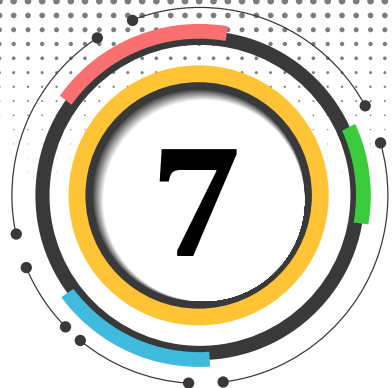
Menurut BPS (2023), gender merujuk pada perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan norma-norma yang melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kesetaraan gender di Indonesia diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang mencerminkan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, pemerintah Indonesia

telah memperkuat peran aktif perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang dikeluarkan pada tahun 2000, menjadi landasan strategis untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pembangunan nasional. PUG bertujuan mengurangi kesenjangan gender dalam akses dan manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan kontrol perempuan terhadap proses pembangunan.

Tujuan Presiden pada periode 2020-2024 sejalan dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), salah satunya adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. KemenPPPA menerapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan KemenPPPA No. 2 tahun 2020. Langkah-langkah KemenPPPA melibatkan peningkatan peran serta perempuan di sektor-sektor kunci pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.

Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan menjadi fokus penting KemenPPPA untuk memperkuat jejaring dan koordinasi. Data berbasis gender dianggap sebagai alat penting dalam merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bertujuan mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.



PENUTUP

Berdasarkan temuan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender mengalami fluktuasi sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, terjadi penurunan namun tidak signifikan, dan tren ini berlanjut setelah pandemi dengan penurunan yang tidak terlalu besar. Provinsi Nusa Tenggara Barat menonjol sebagai daerah dengan ketimpangan gender tertinggi sebelum dan sesudah pandemi, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menjadi provinsi dengan ketimpangan terendah dalam kedua periode tersebut. Sebelum munculnya Covid-19, pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi Indonesia mengalami kenaikan, meskipun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup rendah setelah dampak pandemi. Beberapa provinsi, seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menonjol. Hasil penelitian menyoroti dampak signifikan Covid-19 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi. Sebaliknya, variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sementara variabel lain, seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan rasio upah laki-laki terhadap perempuan, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kedua periode tersebut.

Data pembangunan gender di Indonesia menyoroti variasi yang mencolok antar provinsi, menciptakan gambaran dinamis mengenai kesetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir. Provinsi Jakarta

dan Yogyakarta menjadi sorotan dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2010 dan 2022. Di sisi lain, Provinsi Papua, meskipun mengalami peningkatan, tetap memiliki nilai terendah hingga 2022. Menariknya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian pada tahun 2022, menunjukkan perubahan dinamis dalam pemberdayaan gender. Analisis menunjukkan bahwa variabel pembangunan gender dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, temuan menarik muncul ketika variabel seperti pemberdayaan gender, rasio upah laki-laki terhadap perempuan, pertumbuhan investasi, dan tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat kemiskinan. Ini menggarisbawahi pentingnya fokus pada upaya pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, sebagai cara efektif untuk memperkuat kesetaraan gender dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Ketimpangan gender menjadi penghambat tercapainya pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan tenaga kerja dan ekonomi yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan negara. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya kesetaraan gender dan peran serta perempuan dalam pembangunan desa, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 merupakan komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB untuk turut serta mewujudkan SDGs, salah satu tujuan global SDGs yang selaras dengan pembangunan nasional Indonesia, adalah jaminan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta Peraturan KemenPPPA Nomor 2 Tahun 2020, adapun kebijakan yang

dikeluarkan oleh KemenPPPA antara lain peningkatan peran dan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.

Dalam upaya menurunkan ketimpangan gender dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beberapa saran dapat diajukan berdasarkan kesimpulan penelitian sebelumnya. Pertama, kepada semua pihak yang membaca penelitian ini, perlu diingat bahwa menghilangkan ketimpangan gender dapat dimulai dari tindakan sederhana di lingkungan sekitar. Ini mencakup menghapus stereotip gender yang memandang perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan mengatasi stereotip lainnya yang membatasi kontribusi perempuan dalam mendorong perekonomian. Kedua, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu lebih mengintegrasikan isu gender dalam program dan kegiatan mereka. Analisis data berbasis gender yang komprehensif perlu dilakukan dari tingkat lokal hingga nasional untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat diukur dan sesuai sasaran. Kebijakan tertulis dan resmi juga diperlukan untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat dalam mendorong pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Indonesia. Ketiga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan indikator makroekonomi, seperti perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan tenaga kerja, terutama perempuan. Ini dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang meningkatkan pendapatan negara, produktivitas agregat, dan kesejahteraan keluarga. Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan, dan penelitian selanjutnya dapat melengkapi keterbatasan tersebut, terutama dalam mengembangkan analisis variabel pembangunan gender dan pemberdayaan gender dengan menggunakan berbagai variabel.

Sementara itu, dalam rangka menurunkan ketimpangan gender dan mengatasi kemiskinan di Indonesia, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, upaya mengurangi ketidaksetaraan gender dapat dimulai dengan mengubah pandangan terhadap perempuan di lingkungan sekitar. Penting untuk menghapus stereotip yang menyatakan bahwa perempuan tidak membutuhkan pendidikan yang

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sementara peran besar perempuan dalam perekonomian harus diakui dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas. Kedua, pemerintah perlu memfokuskan upaya untuk mengurangi ketimpangan gender, terutama dalam dimensi ekonomi, khususnya di Provinsi Papua. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di sektor ketenagakerjaan, seperti memberikan hak cuti melahirkan dan hari menstruasi, serta menyediakan fasilitas ruang menyusui di tempat kerja. Ketiga, perbaikan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu ditingkatkan, terutama di provinsi-provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, T. (2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu kesenjangan gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 13-32.
- Abda, S. A., & Cahyono, H. (2022). Apakah IPM, Pengangguran, Dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Kota Surabaya?. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 2(1), 61-76.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).
- Deris, L. R. V., Bhinadi, A., & Nuryadin, D. (2022). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia (34 provinsi) tahun 2015-2020. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2947-2958. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.481>.
- Glazebrook, T., & Opoku, E. (2020). Gender and sustainability: Learning from women's farming in Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 12(24), 1-20. <https://doi.org/10.3390/su122410483>.
- Mirna & Sandy, S. (2017). Analisis faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 1(1), 1-1.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar ekonomi makro*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Leasiwal, T. C. (2022). *Teori-teori pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan variabel makro ekonomi*. Sumatera Barat: CV. Mitra Cendekia Media.

- Khaerani, S. N. (2017). Kesetaraan dan ketidakadilan gender dalam bidang ekonomi pada masyarakat tradisional sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Society*, 11(1), 59-76.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1), 17-41.
- Tampubulon, E. G., Irvan, M., & Hartono, D. (2022). Determinan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2020. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(1), 68-80.
- Ratnawati, D., Sulistyorini & Abidin, A. Z. (2019). Kesetaraan gender tentang pendidikan laki-laki dan perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13436>.
- Dewi, K. H., Aziz, N. L. L., & Raharjo, S. N. I. (2020). Perempuan kepala daerah dan penanggulangan kemiskinan berperspektif gender di Indonesia.
- Virgianita, A., Dara, A., & Dina, A. (2021). Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045.
- Nofianti, L. (2016). Perempuan di sektor publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(1), 51-61.
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*, 1(1).
- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Di persimpangan jalan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Larasati, M., Rozan, H., Saputra, I. D., & Radianto, D. O. (2023). PEGEMI (Peran Generasi Milenial) Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Media Sosial. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 505-517.
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., ... & Mendo, A. Y. (2023). *Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media.

- Aula, M. R. (2023). Isu-Isu Gender Dalam Keterwakilan (Ketimpangan Gender) dalam Kehidupan Politik Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 190-200.
- Nurchahaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108-116.
- Fakih, M. (2001) Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuspin, W., & Aulia, S. E. (2022). Traces of Gender Equality in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), 279-284.
- Astariyani, N. L. G., Hermanto, B., Setyari, N. P. W., & Sudiarawan, K. A. (2022). Gender Equality Inclusion into Indonesia Regional Development Plan Cycle Based on Pancasila and Gender Mainstreaming. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 25, 1.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesenjangan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995-1010.
- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117-138. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>.
- Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis indikator ketimpangan gender dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151-162. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>.
- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Pemberdayaan gender, pendapatan perempuan dan penurunan kemiskinan: Bukti data panel dari Kawasan Barat Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 37-56. <https://doi.org/10.25105/me.v28i1.6265>.
- Aeni, N. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian*,

- Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 17-34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>.
- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020). Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 229-242. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.
- Agusalim, L., Anggraeni, L., & Pasaribu, S. H. (2022). The Economy of Indonesia: Driven by Physical or Human Capital?. *JEJAK*, 15(1), 10-28.
- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01).
- Aliyah, A. H. (2022). Menelaah relasi gender equality terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa tengah. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 180-194. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5638>.
- Amory, J. D. S. (2019). Peranan gender perempuan dalam pembangunan di Sulawesi Barat tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-15.
- Aprilia, B., Surya, F. M., & Pertiwi, M. S. (2020). Analisis pergeseran makna partisipasi politik perempuan berdasarkan karakteristik feminitas dan maskulinitas dalam kepemimpinan perempuan: Studi kasus penanganan Covid-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2), 91-208. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>.
- Aprilia & Triani. (2022). Analisis pengaruh ketimpangan gender, rasio ketergantungan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(3), 43-50.
- Arianto, Z. (2019). Upaya pemerintahan Joko Widodo dalam mendorong implementasi *sustainable development goals* di Indonesia.
- Arjani, N. L. (2021). Kesetaraan gender di bidang politik antara harapan dan realita. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.24843/SP.2021.v5.i01.p01>.

- Auzar, Z. (2021). Feminization of poverty, multiple pandemic, and feminization of pandemic. In prosiding *Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. 1(1). 248-286.
- Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis determinan kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1-25. <http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/36>.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Konsep gender, IPG dan IDG. Diunduh pada link <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Metodologi IPG dan IDG. Diunduh pada link <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Penduduk miskin dan garis kemiskinan. Diunduh pada link <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Bertay, A. C., Dordevic, L., & Sever C. (2020). Gender inequality and economic growth: Evidence from industry-level data. *IMF Working Papers*, 2020(119), 1-38. <https://doi.org/10.5089/9781513546278.001>.
- Cheteni, P., Khamfula, Y., & Mah, G. (2019). Gender and poverty in South African rural areas. *Cogent Social Sciences*. 1(5), 1-19. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1586080>
- Christiani, N. V., & Nainupu, A. E. (2021). Pengaruh akses terhadap internet, listrik dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(1), 37-52. <https://doi.org/10.5300/jstar.v1i1.14>
- Damanhuri, D. S. (2010). *Ekonomi politik dan pembangunan: Teori, kritik dan solusi bagi Indonesia dan negara sedang berkembang*. Kota Bogor. PT Penerbit IPB Press.
- Putri, C. D., & Fakhruddin, F. (2016). Ketidaksetaraan gender pada kemiskinan wilayah Aceh: Studi komparasi wilayah Kota di

- Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 400-408.
- Direja, S., & Paramitasari, N. (2022). Pengaruh ketidaksetaan gender pada Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(1), 58-70.
- Dormekpor, E. (2015). Poverty and gender inequality in developing countries. *Developing Country Studies*, 5(10), 76-102.
- Fauziyah & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh ketimpangan pendidikan antar gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 71-78. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.17867>.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23-31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). Tinjauan defisit fiskal, ekspor, impor dan jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 151-161. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4907>.
- Hidayah, N., & Munandar, M. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan Desa Tasik Agung dalam berpartisipasi politik. *Unnes Civic Education Journal*, 2(1).
- Hidayah, Z. M., & Rahmawati, F. (2020). Menelusur relasi indikator indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (Provinsi Jawa Timur). *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 110-129. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13919>.
- Infarizki, A. Y., Jalunggono, G., & Laut, L. T. (2020). Analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap produk domestik regional bruto di Jawa Tengah tahun 2010-2018. *Dinamic*, 2(2), 528-547. <https://dx.doi.org/10.31002/dinamic.v2i2.1387>.
- Iriyadi, I., & Purba, J. H. V. (2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Faktor pendorong pada pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 529-544. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1557>.

- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Kangile, J. R., Kadigi, R. M. J., Mgeni, C. P., Munishi, B. P., Kashaigili, J., & Munishi, P. K. T. (2021). The role of coffee production and trade on gender equity and livelihood improvement in Tanzania. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18), 1-14. <https://doi.org/10.3390/su131810191>.
- Kansil, C. S., Prawira, M., & Martono, H. K. (2021). Pertahanan negara dan gender wanita di masa pandemi covid19 di Indonesia. *Prosiding Serina*, 1(1), 549-566. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17511>.
- KemenPPPA & BPS. (2016). *Pembangunan manusia berbasis gender 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- KemenPPPA (2022). *Pembangunan manusia berbasis gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KemenPPPA. (2016). *Statistik gender tematik Potret Ketimpangan gender dalam ekonomi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KemenPPPA. (2023). Peran gender dan gender. Diunduh pada link <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/20#:~:text=Pengarusutamaan%20Gender%20adalah%20proses%20untuk,proyek%2C%20program%20dan%20kebijakan%20pemerintah>. Diakses pada 28 Juli 2023.
- Kertati, I. (2021). Analisis indeks pembangunan gender (ipg) dan indeks pemberdayaan gender (idg) kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 1-11. <http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1960>.
- Kesuma, M. N., & Astuti, E. T. (2020). Kajian indeks modal manusia dan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi indonesia 2015-2018. *In Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1)*, 817-824. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.523>.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharrudin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). Indikator kemiskinan dan misklasifikasi

orang miskin. Jakarta: *Kerjasama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.

- Kim, J., Lee, W. J., & Shin, K. (2016). A model of gender inequity and economic growth. *Adb Economics Working Paper Series No. 475*, 1-29. Diunduh pada link <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/180687/ewp-475.pdf>. Diakses pada 26 Mei 2023.
- Klasen, S., Lechtenfeld, T., & Povel, F. (2015). A feminization of vulnerability? Female headship, poverty, and vulnerability in Thailand and Vietnam. *World Development*, 71, 36-53.
- Koilam, C. T. C., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. I. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 25-36.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia berdasarkan indeks komposit pertumbuhan inklusif dan faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Kusumastuti, A. E. (2019). Peran perempuan dalam mengurangi kemiskinan. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 39-46. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.5>.
- Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan upah antargender di Indonesia: Bukti empiris di sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1-21. <https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.1096>.
- Lativa, S. (2021). Analisis kebijakan fiskal Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161-175. <https://doi.org/10.37721/je.v23i3.869>.
- Lestari, S., Marwah, S., & Pratiwi, O. C. (2020). Capaian indeks pemberdayaan gender Kabupaten Banyumas pasca MDGS dalam perspektif regional dan nasional. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Universitas Jenderal Soedirman*. 9(1).

- Li, J., Huang, D. Q., Zou, B., Yang, H., Hui, W. Z., Rui, F., Natasha, T. S. Y., Liu, C., Nerukar, N. N., Kai, J. C. Y., Teng, M. L. P., Li, X., Zeng, H., Borghi, J. A., Henry, L., Cheung, R., & Nguyen, M. H. (2020). Epidemiology of Covid-19: A systematic review and meta-analysis of clinical characteristics, risk factors, and outcomes. *J Med Virol*, August, 1–10. <https://doi.org/10.1002/jmv.26424>.
- Lusiarista & Arif, M. (2022). Peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Pati periode 2015-2020. *Social Science Studies*, 2(3), 197-214. <http://dx.doi.org/10.47153/sss23.3792022>.
- Manggala, G. D. (2020). Analisis perkembangan dan proyeksi perekonomian Indonesia dari tahun 2014-2020 setelah adanya pandemi corona. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS)*, 2(1), 1-5.
- Minasyan, A., Zenker, J., Klasen, S., & Vollmer, S. (2019). Educational gender gaps and economic growth : A systematic review and meta-regression analysis. *World Development*, 122, 199–217. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.006>.
- Muhartono, D., S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(2), 117-134.
- Munasaroh, A. (2022). Problematik kekerasan berbasis gender dan pencapaian gender equality dalam sustainable development goals di Indonesia. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1-20.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and under-developed regions*. London: Gerald Dukworth and Co. Ltd.
- Myrdal, G. (1968). *Asian Drama: An inquiry into the poverty of nations. A twentieth century fund study*, 1, 2, 3. New York: Pantheon.
- Napitupulu, F., & Ekawaty, M. (2022). Ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada negara-negara Asia Timur Dan Pasifik. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(1), 29-43. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.4>.
- Nastiti, N. N., & Harikesa, I. W. A. (2023). Fenomena penyebaran pandemi Covid 19 dan kesenjangan gender di Asia Tenggara

- (studi kasus: Dampak Covid 19 terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia (2020-2021). *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(01), 109-132. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567>.
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan transaksi bisnis e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506-519. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227>.
- Nazmi, L., & Jamal, A. (2018). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 740– 750.
- Nisak, S. V. & Yasa, I. N. M (2021). The impact of levels gender equality and justice on provincial economic growth in Indonesia. *IJISSET-International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 8(6), 47-51.
- Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375-387.
- Nugroho, A., & Clarissa A. (2022). *Kajian penghitungan indeks ketimpangan gender 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nurkse, R. (1961). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University press. New York.
- Nursini, N. & Syahrul, S. (2022). Tinjauan peran kualitas gender dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 1(2), 14-27.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2(2), 44-66. doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160.
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43-61. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.43-61>.

- Pertiwi, U. E., Heriberta, H., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(2), 69-76. <https://doi.org/10.53867/JEA.v1i2.17>.
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 53-60. <http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>.
- Putri, W. F. I. (2023). Ekonomi tumbuh 5%, tanda orang RI sejahtera bu Sri Mulyani?. Diunduh pada link <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230510080147-4-436020/ekonomi-tumbuh-5-tanda-orang-ri-sejahtera-bu-sri-mulyani#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Sri%20Mulyani%20Indrawati,hingga%20melakukan%20ekspor%20dan%20impor>. Diakses pada 26 Mei 2023.
- Putri, G. S. (2020). *WHO resmi sebut virus corona Covid-19 sebagai pandemi global*. Diunduh pada link <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-Covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>. Diakses pada 11 April 2023.
- Putri, R. Y., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). Analisis kemiskinan berdasarkan gender di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 603-612.
- Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali dalam pergulatan gender. *Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 58-64.
- Rahmawati, R. (2020). Implementasi undang-undang desa no. 6 tahun 2014 tentang penyetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 16-35. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>.
- Ravallion, M. (1998). Poverty lines in theory and practice: Living standard measurement study, *Working Paper No.13: The World Bank*.
- Ravallion, M. (2020). Ethnic inequality and poverty in Malaysia since May 1969. Part 2: Poverty. *World Development*, 134, 105039. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105039>.

- Ridhwani, I., & Lestari, Y. (2023). Rekontruksi kebijakan publik dan hukum islam terkait gender dalam mencapai SDGs. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 37-52.
- Ruiters, M., Charteris, A., 2020. Gender equality in labour force participation, economic growth and development in South Africa. *Dev. South. Afr.* 37, 997-1011. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1772042>.
- Sari, C. P. (2021). Gender inequality: Dampaknya terhadap pendapatan per kapita (studi kasus 33 provinsi di Indonesia 2011-2019). *Berdikari: Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(1), 47-52. <http://dx.doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>.
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu kajian berdasarkan faktor pendidikan, sosial, ekonomi, lokasi dan IPM. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 8(1), 37-50.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2022). *Situasi Covid-19 di Indonesia*. Diunduh pada link <https://Covid19.go.id/artikel/2022/12/31/situasi-Covid-19-di-indonesia-update-31-desember-2022>. Diakses pada 11 April 2023.
- Sen, A. (1990). *Development as capability expansion*. New York. The community development reader.
- Siregar, L. H. M., & Rizky, M. (2022). Penerapan error correction mechanism dalam pemodelan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2021. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 551-559. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.150>.
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender equality and women empowerment in the national development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>.
- Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Sosio Informa Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 89-101. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.190>.

- Suryanti, M. & Sholikhah, N. (2021). Gender gap sebagai determinan ketimpangan pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *FORUM EKONOMI*, 23(2), 285-294.
- Sutrisno, B. (2020). 50 days of Indonesia's partial lockdown. Is it enough for the 'new normal'? retrieved from Jakarta post. Diunduh pada link <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/28/50-days-of-indonesias-partial-lockdown-is-it-enough-for-the-new-normal.html>. Diakses pada 11 April 2023.
- Tanzihah, I, Utomo, H., Utami, A., Arifin, J., Angraini, S., Bodromurti, W., Nurhayati. (2021). *Pembangunan manusia berbasis gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59-67.
- Udzma, N. S., Hamid, A., & Herwati. (2023). Analisis ketidakadilan gender dalam budaya patriarki menurut Karin Van Nieuwkerk dalam buku women embracing Islam. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(3), 1709-1716. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1438>.
- UNDP. (2016). Human development report 2016: Human development for everyone. *UNDP, New York*. Diunduh pada link <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN>. Diakses pada 11 April 2023.
- UNDP. (2016). Ending poverty by 2030: UNDP's perspective and role. New York (US): *United Nations Development Programme*.
- Walid, W., & Pratama, B. R. (2020). Analysis of gender inequality in poverty reduction program. *Economics Development Analysis Journal*, 9(4), 482-497. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i4.41950>.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42.

- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Wordbank. (2023). Ratio of poverty headcount to income of \$2.15 per day (2017 PPP) (% of population) - Indonesia. Diunduh pada link <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2021&locations=ID&start=2010>. Diakses pada 12 Juli 2023.
- World Bank. (2021). World Bank national accounts data, and OECD national accounts data files. Diunduh pada link <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&start=1961>. Diakses pada 11 April 2023.
- Wulandari, M. C., & Ratnasari, D. F. (2022). Hubungan pendapatan perempuan dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Karesidenan Kartasura. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Fakultas Ekonomi*. 326-334.
- Yasin, M. (2020). Analisis pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussiness and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465-472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>.

Gender dan Pembangunan Ekonomi

Studi Lintas Provinsi di Indonesia

Ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan gender yang tinggi menjadi penghambat tercapainya pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tentunya menyebabkan kesejahteraan yang timpang antargender.

Buku "Gender dan Pembangunan Ekonomi: Studi Lintas Provinsi di Indonesia" ini adalah sebuah analisis tentang hubungan antara gender, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia. Buku ini mengungkap fluktuasi ketimpangan gender sebelum dan setelah pandemi Covid-19, dengan penurunan yang tidak signifikan sebelum pandemi dan penurunan yang lebih rendah setelahnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat menonjol sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan gender tertinggi, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat ketimpangan terendah.

Hasil studi dalam buku ini menunjukkan bahwa Covid-19 dan ketimpangan gender telah menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama sesudah Covid-19. Pembangunan gender dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran krusial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Studi ini menghimbau perlunya meningkatkan pemberdayaan perempuan, terutama melalui peningkatan akses pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender sebagai kunci utama dalam mengatasi kemiskinan di berbagai provinsi Indonesia. Buku ini juga memberikan masukan untuk mengatasi ketimpangan gender, seperti perlu adanya peningkatan peran dan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia

ISBN 978-623-130-634-0

